

NTJA SILA  
ANTI  
RASIALISME

SIAUW GIOK TJHAN



## **Pantja Sila Anti Rasialisme**

INDO-4111

*Pantja Sila*  
*Anti*  
*Rasialisme*

Siauw Giok Tjhan



Bagian Penerbitan  
**PUSAT BAPERKI**

## KATA PENGANTAR PENERBIT

Penerbit telah mengambil putusan untuk menerbitkan buku ini dengan djudul „Pantja Sila Anti Rasialisme”, berdasarkan pertimbangan<sup>2</sup> sebagai berikut :

1. Didalam proses "nation-building" Indonesia menudju ke-masyarakat sosialis, jang bersih daripada "exploitation de l'homme par l'homme", kita ternjata perlu memper-tinggi kewaspadaan nasional kita, supaja revolusi kita tetap murni dan segar.
2. Arti kata "nation" dan "race" jang diterdjemahkan dengan „bangsa” memang masih menimbulkan kekaburan.
3. Kekaburan itu terutama bersumber pada aliran "rasialisme", jang dapat menjelewengkan revolusi kita, jang pada hakekatnja adalah perdjjuangan klas, mendjadi per-tentangan ras.

Selandjutnja mengingat, bahwa Pantja Sila mengandung djuga Sila Perikemanusiaan, maka terasa perlu untuk mempertegas, bahwa "rasialisme" telah dibantah dasar ilmiahnja oleh 14 orang sardjana, jang dipilih oleh PBB untuk melaksanakan penjelidikan. Hasil penjelidikan 14 orang sardjana dunia itu disjahkan dalam bentuk "Statement on Race" oleh Sidang Umum PBB. Didalamnja dapat didjumpai pernyataan<sup>2</sup> sebagai berikut :

- a. National religions, geographic, linguistic and cultural groups do not necessarily coincide with racial groups ; and the cultural traits of such groups have not demonstrated genetic connection with racial traits.  
(Kelompok<sup>2</sup> nasional, agama, geografi, bahasa dan kebudajaan tidak perlu djatuh bersama dengan kelompok<sup>2</sup> rasial ; dan tjiri<sup>2</sup> kebudajaan dari kelompok<sup>2</sup> itu tidak mempunjai hubungan genetik jang njata dengan tjiri<sup>2</sup> rasnja).
- b. It would be better when speaking of human races to drop the term "race" all together and speak of ethnic groups.  
(Adalah lebih bidjaksana, apabila berbitjara tentang ras manusia untuk tidak menggunakan istilah „ras" sama sekali dan bitjaralah tentang kelompok<sup>2</sup> ethnik).
- c. The biological fact of race and the myth of "race" should be distinguished. For all practical social purpose, "race" is not so much biological phenomena as a social myth. The myth of "race" has created an enormous amount of human and social damages.  
(Fakta biologis tentang ras dan mithos tentang „ras" haruslah dibedakan. Untuk segala persoalan masyarakat jang praktis, „ras" lebih merupakan mithos sosial daripada gedjala biologis belaka. Mithos — dongengan —

**„ras” ini telah mentjiptakan kerusakan<sup>2</sup> besar bagi masyarakat dan ummat manusia).**

Baik sekali dalam hubungan dengan usaha untuk melenjapkan tjiri<sup>2</sup> suatu kelompok ethnik, antara lain dengan „andjuran” ganti nama, umpamanja, kita perhatikan, dalam rangka usaha mengembangkan pengakuan dan perindahan terhadap hak<sup>2</sup> azasi manusia, ketegasan dari “Convention on the Punishment and Prevention of the Crime of Genocide” (Konvensi Tentang Penghukuman Dan Pentjegahan Kedjahatan Genocide), seperti disjahkan oleh Sidang Umum PBB. Sebagai kedjahatan “genocide” (pembasmian manusia) itu dimaksudkan :

“Committing certain acts with intent to destroy, in whole or in part, national, ethnical, racial or religious group as such. (Melakukan tindakan<sup>2</sup> tertentu dengan maksud untuk menghantjurkan — sebagian atau seluruhnja, kelompok<sup>2</sup> nasional, ethnik, rasial atau agama sebagai kelompok).

“The acts, constitute genocide are killing, causing serious bodily or mental harm, deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent birth, and the forcible transfer of children.”

(Tindakan<sup>2</sup> jang termasuk genocide adalah pembunuhan, menjebabkan kerusakan badaniah atau rochaniah, dengan sengadja mentjiptakan sjarat<sup>2</sup> hidup jang diperhitungkan guna membawa kehantjuran/kemusnaan pada keseluruhan atau sebagian, mengambil tindakan<sup>2</sup> dengan tudjuan mentjegah kelahiran atau memindahkan anak<sup>2</sup> setjara paksa).

Djadi usaha melenjapkan suatu kelompok ethnik, baik setjara badaniah maupun setjara rochaniah, termasuk perbuatan genocide jang terkutuk.

Achirnja baik sekali kita perhatikan, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang dibangkitkan dan diperkokoh dalam perdjjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Dalam „Lahirnja Pantja Sila” Presiden Soekarno telah mempertegas: Nasionalisme hanjalah dapat subur didalam tamansarinja internasionalisme. Internasionalisme hanjalah dapat hidup subur, djikalau berakar dibumi nasionalisme. Dua ini harus wahju-mewahjui satu sama lain !

Buku ini disusun berdasarkan laporan Saudara Siauw Giok Tjhan sebagai Ketua Umum Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) pada Konperensi Baperki dan sebagai penerbit kami mengharapnka pikiran<sup>2</sup>nja dapat membantu usaha memelihara revolusi kita tetap segar dan murni menudju kemasjaraikat sosialis, jang bersih dari exploitation de l’homme par l’homme !

## MADJU TERUS MELALUI DJALAN PANTJA SILA DENGAN MANIPOL SEBAGAI KOMPASNJA

Konperensi Pleno Baperki kali ini dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Pengurus Pusat Harian memang sengadja memilih tanggal ini dengan harapan, bahwa berlangsungnja konperensi pleno pada Hari Pahlawan ini akan dapat mempengaruhi baik usaha memperhebat kebulatan tekad barisan massa Baperki untuk melaksanakan tugas sedjarahnja guna menjempurnakan dan mengkonkritkan hasil segala pengorbanan pahlawan jang telah diberikan oleh para pahlawan kita dalam perdjjuangan mempertegak dan menjelamatkan Republik Indonesia, Republik Proklamasi 1945 sebagai modal pertama untuk membangun masjarakat sosialis sebagai pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia.

Untuk mengkonkritkan penghormatan massa Baperki pada segala djasa para pahlawan kita jang telah mendahului kita meninggalkan dunia fana ini dalam perdjjuangan melaksanakan tiga kerangka revolusi seperti didjelaskan dalam Manifesto Politik, Jajasan Pendidikan & Kebudajaan Baperki pada tanggal 10 Nopember ini akan meresmikan penggunaan Gedung Fakultas Tehnik Baperki, jang akan memperluas kesempatan bagi para pemuda kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tehnik, supaja dapat mengabdikan diri setjara lebih baik pada perkembangan pembangunan masjarakat dalam revolusi menudju kemasjarakat sosialis, jang tidak mengenyal lagi adanja exploitation de l'homme par l'homme. Sebagai permulaan sebentar sore akan diresmikan penggunaan bangunan pertama dari Fakultas Tehnik, jang luasnja 2.000 meter persegi, berikut sebuah bangunan sementara jang luasnja 400 meter persegi.

Seperti dikatakan tadi konperensi pleno ini terutama ditunjukkan untuk memperhebat kebulatan tekad massa Baperki untuk melaksanakan tugas sedjarahnja, yakni tudjuan Baperki sebagai organisasi massa, jang dengan tegas telah menjatakan :

a. Menjetudjui dengan bulat garis Presiden Soekarno tentang tjara penjelesaian masalah minority, seperti dirumuskan dalam amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki di Solo.

b. Memperlantjar proses pembangunan nation, jang berwujud masjarakat sosialis, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan, bebas dari rasa takut akan menderita kemelaratan dengan berachirnja sistim exploitation de l'homme par l'homme.

c. Mendukung pelaksanaan Manifesto Politik dan menjatakan sedia membantu aktif pelaksanaan pengerahan funds and forces progressif untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis.

d. Memperdjuangkan setjara lebih sungguh<sup>2</sup> pelaksanaan semua pedoman pelaksanaan Manipol untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan Manipol.

e. Mengusahakan meratanja indoktrinasi Manipol-Usdek-Resopim dan kemauan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan”, terutama dikalangan kader dan massa Baperki sendiri.

Oleh karenanja, terasa ada manfaatnja, apabila pada permulaan konperensi ini kita terutama memperhatikan berbagai hal, jang mendjadikan dasar untuk merumuskan program perdjuangan dan program kerdja Baperki sebagai organisasi massa, jang tegas mendukung Manipol itu.

Paling pertama tentu ada baik sekali, apabila kita menjelaskan ingatan kita tentang isi amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki, jang kita telah setudjui dengan suara bulat untuk dilaksanakan setjara sungguh<sup>2</sup> dan intensif.

Isi amanat Presiden itu selengkapnja adalah sebagai berikut :

„Bangsa Indonesia menurut kenjataan terdiri dari berbagai

matjam suku dan keturunan, disamping mengenal ratusan „bahasa daerah”. Usaha mempertjapat proses integrasi bangsa untuk mentjapai satu „nation”, jang bebas dari prasangka keturunan (racial prejudices) dan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, memerlukan waktu dan keuletan berdjuang.

„Dilapangan perundang-undangan sekarang sudah ditjapai berbagai kemadjuan dengan adanja ratifikasi perdjandjian penjelesaian dwi-kewarga-negaraan, dengan adanja undang<sup>2</sup> kewarga-negaraan Republik Indonesia dan undang<sup>2</sup> wadajib militer.

„Tetapi dengan adanja undang<sup>2</sup> ini sadja belum tertjapai tjita<sup>2</sup> perdjjuangan kemerdekaan nasional.

„Kita masih menghadapi masalah pembangunan masjarakat jang adil dan makmur, sesuai dengan kepribadian Rakjat Indonesia sendiri. Dengan terlaksanaja pembangunan masjarakat jang adil dan makmur ini, Insja Allah akan terlaksanalah tjita<sup>2</sup> membangun „nation”, dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan.

„Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini, sesungguhnya adalah satu masalah menghapuskan sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan mentjapai „full employment”. Dengan demikian penjelesaian bukanlah dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan memikirkan dan melaksanakan pembangunan setjara besar-besaran dengan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada, baik berupa „technical know how”, „managerial skill” dan modal jang tersedia di Indonesia, djuga dari kalangan<sup>2</sup> golongan ketjil, sambil memperhatikan bagaimana si ekonomis lemah terhadap si ekonomis kuat. Soalnya jalah : Bagaimana meratakan kesedjahteraan !

„Mengingat hal ini, maka saja doakan semoga Kongres Baperki akan memberi sokongan sekuat kemampuan organisinja untuk melaksanakan pembangunan setjara besar-

besaran dalam rangka pelaksanaan ekonomi dipimpin jang setjara tegas menudju kearah tertjapainja masjarakat adil dan makmur!"

Demikianlah bunji amanat Presiden Soekarno, jang sedari Kongres Baperki di Solo telah mendjadi landasan bagi Baperki untuk merumuskan program perdjungan dan program kerdja Baperki. Bunji amanat Presiden Soekarno itu lagi pula telah membenarkan garis perdjungan jang dianut selama itu oleh Baperki, jang berdasarkan kongres di Surabaya satu tahun jang lebih dahulu dari kongres di Solo telah menegaskan, bahwa penyelesaian masalah golongan ketjil di Indonesia hanja dapat diselesaikan dengan mempertjepat pembangunan masjarakat Pantja Sila, jang melaksanakan semangat Bhinneka Tunggal Ika, jang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan bagi tiap orang warga-negara.

Berdasarkan putusan Kongres Baperki di Surabaya itu, Baperki sudah mulai merumuskan program kerdjanja, jang lebih mengutamakan usaha<sup>2</sup>, jang menguntungkan perkembangan pembangunan masjarakat Pantja Sila, jang mendjamin pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika dengan mewudjudkan adanja rasa harga sama antara semua orang warga-negaranja dengan sikap toleran terhadap kenjataan adanja perbedaan golongan<sup>2</sup> ethnik dan perbedaan golongan agama.

Setelah kongres di Solo dengan menerima setjara sertamerta garis Presiden Soekarno, seperti jang dirumuskan dalam amanatnja itu, Baperki lebih mempertegas sifat nasionalnja dan tegas memilih fihak Rakjat Indonesia jang berdjung untuk mempertjepat terwudjudnja masjarakat adil dan makmur, jang berarti terlaksananja tjita<sup>2</sup> membangun „nation", dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan.

Memang, Baperki belum pernah sedari didirikannja merupakan organisasi jang bersifat eksklusief, karena Baperki dalam perdjungannja tidak pernah mengutamakan kepentingan suatu golongan setjara khusus dengan hanja menen-

tang praktek<sup>2</sup> diskriminasi rasial jang bersifat negatif, tetapi selalu meletakkan titik-berat perjuangannya pada usaha mempertjepat terwujudnja „nation” sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945 jang tegas positif. Karena Baperki yakin, bahwa dengan terwujudnja „nation” sesuai dengan djiwa proklamasi itu, pasti dengan sendirinja lenjap praktek<sup>2</sup> diskriminasi rasial.

Dengan memperhatikan semua kenyataan ini, maka terasa-lah bahwa Baperki selama ini tidak pernah meninggalkan rel aslinja, tetap setia pada tudjuan aslinja dan tetap pada garis perjuangan aslinja. Jang berkembang ialah ketegasan rumusan dari garis perjuangan aslinja itu, jaitu sebagai berikut :

Ketika didirikan Baperki dengan tegas menjatakan memperjuangkan terwujudnja „nation” sesuai dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam kongresnja di Surabaya „nation” dengan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945 itu dirumuskan sebagai „terwujudnja masyarakat Pantja Sila jang mewujudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika”.

Dalam kongresnja di Solo, jang menerima serta-merta garis Presiden Soekarno, maka rumusan masyarakat Pantja Sila, jang mewujudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika, dirumuskan mendjadi masyarakat adil dan makmur, jang melaksanakan tjita<sup>2</sup> membangun „nation”, dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Untuk mentjapai ini kita harus menghapuskan sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan mentjapai „full employment”. Djadi bukan dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada didalam negeri.

Dalam kongresnja di Djakarta dan Semarang, setelah Presiden Soekarno mengumumkan dekrit 5 Djuli 1959 untuk berlakunja sah kembali UUD 1945 dan setelah kita mengenal adanya Manifesto Politik 17-8-1959, maka rumusan masyarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat<sup>2</sup>

„under-developed” dan mentjapai „full employment”, pun mendjadi turut tambah tegas dengan kemajuan perkembangan politik didalam negeri kita sendiri, jaitu mendjadi masjarakat sosialis, jang bersih daripada „exploitation de l'homme par l'homme”. Untuk keperluan ini harus diperdjuangkan adanja pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum.

Sedikit sedjarah perkembangan rumusan, jang pernah dialami oleh Baperki ini membuktikan setjara lebih tegas, bahwa Baperki adalah organisasi nasional, jang selalu menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan jang manapun sadja. Baperki sedari didirikan selalu berpendirian, bahwa kepentingan golongan ketjil atau penjelesaian masalah minority, wadajib diperdjuangkan bukan dengan djalan menondjol-nondjolkan kepentingan golongan ketjil (minority), melainkan dengan djalan memperdjuangkan setjara lebih sungguh<sup>2</sup> dan setjara lebih sistematis pewudjudan „nation” berdasarkan djiwa proklamasi 17 Agustus 1945; dengan pembangunan masjarakat „Pantja Sila” jang mewudjudkan pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika; dengan terlaksananja „nation-building” jang mewudjudkan masjarakat adil dan makmur, jang bersih dari sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan mentjapai „full employment”; dengan memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis, jang bersih daripada exploitation de l'homme par l'homme.

Dengan demikian mendjadilah djelas djuga, bahwa sedari didirikan, Baperki merupakan salah satu alat revolusi untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat dan selama ini dari sedjarah perkembangannja berusaha mendjadi alat revolusi jang efektif.

Hal ini ternjata dari kenjataan, bahwa Baperki selalu mengikuti djedjak kemajuan revolusi kita dengan seksama dan mengikuti irama kemajuan dengan baik.

Baperki malahan adalah salah satu organisasi pertama jang menjatakan diri mendjadi anggota Front Nasional untuk membantu berusaha melaksanakan „samenbundeling van alle revolutionaire krachten” dan Baperki tanpa ragu<sup>2</sup> siap sedia mendjalankan segala tugas revolusi jang mendjadi bebannja

untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis dan mendjamin pelaksanaan tiga kerangka revolusi Indonesia.

Seperti kita semua masih ingat, ketika kita menghadapi pelaksanaan Trikora dalam menghadapi kemungkinan adu kekuatan dengan pendjajah Belanda, tidak sedikit massa Baperki telah mendaftarkan diri sebagai sukarelawan dan malahan ada djuga anggota Baperki jang telah memperoleh dan mendjalankan tugas digaris depan. Pun dalam rangka mempersiapkan kader<sup>2</sup> pembangunan untuk Irian-Barat, Baperki ikut serta aktif sebagai organisasi massa anggota Front Nasional. Malahan salah seorang kader wanita Baperki, jaitu Saudari Nona Effie Tjoa, telah mendaftarkan diri dan telah ikut serta dalam kursus<sup>2</sup> kader pembangunan untuk Irian-Barat, jang diselenggarakan oleh Front Nasional Pusat pada tingkat Pusat.

Perkembangan ini disebabkan, karena Baperki sebagai organisasi massa memang mendukung dan menjetudju penuh pernjataan Presiden Soekarno dalam Resopim, jang menegaskan : „..... melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi. Mengerti Amanat Penderitaan Rakjat berarti mempunyai orientasi jang tepat terhadap Rakjat. Bukan Rakjat sebagai kuda tunggangan, tetapi Rakjat sebagai satu-satunja jang berdaulat di Republik Proklamasi, sebagai tertulis didalam Pembukaan UUD 1945. Menerima Amanat Penderitaan Rakjat berarti ; mentjintai Rakjat, memperhatikan kepentingan<sup>2</sup> Rakjat, mendahulukan kepentingan Rakjat daripada kepentingan diri sendiri, atau kepentingan kantong sendiri, atau kepentingan pundi-pundiinja sendiri!”

### **Mempertinggi kewaspadaan nasional revolusioner.**

Sebagai organisasi massa nasional, jang berusaha menjediakan diri sebagai salah satu alat revolusi untuk memperdjuangkan tiga kerangka revolusi mentjapai masjarakat sosialis, maka dengan sendirinja dalam perkembangannja Baperki sebagai organisasi massa nasional itu wadjib ikut

serta membantu mempertinggi kewaspadaan nasional jang revolusioner. Kewaspadaan nasional jang ditudjukan untuk mendjamin kelantjaran langsungnja revolusi kita melaksanakan tiga kerangka revolusi seperti dirumuskan dalam Manifesto Politik.

Dalam usaha mempertinggi kewaspadaan nasional jang revolusioner itu, tentu sadja pertama-tama kita perlu sekali memperhatikan tjanang, sinjalemen Presiden Soekarno, seperti dikemukakan dalam Resopim. Tjanang itu adalah sebagai berikut :

„Ada pula pemimpin<sup>2</sup>, jang menjerukan kepada Rakjat, supaja Rakjat „awas-awaslah terhadap orang<sup>2</sup> jang memakai Manipol, Djarek, Usdek dan Amanat Penderitaan Rakjat, hanja sebagai merk sadja”, tetapi kenjataannja mereka sendirilah mendahulukan kepentingan dewek. Hai Rakjat, awas terhadap „pemimpin<sup>2</sup>” jang demikian itu! Tidak semua „ketjap nomor satu” adalah benar<sup>2</sup> nomor satu! Banjak jang tiruan, bung, banjak jang palsu!

„Dwi-tunggal Proklamasi dan UUD 1945! Alangkah hebatnja, alangkah mengagumkannja.

„Memang selalu saja dengung-dengungkan, bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi jang „unik” — satu revolusi jang „lain daripada jang lain”. Selalu saja katakan, bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi multicomplex, revolusi Pantja-Muka, revolusi jang „a summing up of many revolutions in one generation”. Sudah barang tentu pada waktu itu banjak golongan diluar negeri mengatakan, bahwa saja ini „a little confused”, — sedikit bingung, barangkali sedikit tidak waras otak. Tetapi didalam negeri pun saja pada waktu itu „kena tjap”. Sebagian dari kaum intelek kita, jaitu golongan intelek jang saja namakan kaum cynici, atau golongan intelek jang tidak mempunjai kesadaran politik, tidak mempunjai „politiek bewustzijn” — mereka kadang<sup>2</sup> saja namakan „politiek bewusteloozen” — mengatakan, bahwa perkataan saja tadi „omong kosong” belaka atau „ngawur!” Ada djuga jang mengatakan bahwa saja ini seorang „demagog”, dan ada pula jang menjebutkan saja seorang „fraseolog”, jang pandai memakai perkataan<sup>2</sup> muluk<sup>2</sup> seperti

„unik”, „multicomplex”, „pantjamuka” dan lain sebagainya itu. Tapi jang paling menjedihkan ialah adanja pada waktu itu kaum intelek-cynici jang mengatakan, bahwa saja **membelokkan** revolusi Indonesia kearah „kiri”, kearah Rakjat djembel, kearah „complex-complexan”, kearah „APR-APR-an” dan lain sebagainya. (APR = Amanat Penderitaan Rakjat). Mereka, kaum cynici ini, rupanja tidak pernah memperhatikan benar<sup>2</sup> isi dan arti Pembukaan UUD 1945! Mereka rupanja tidak mengerti, bahwa revolusi kita ini memang **sedari asal-mulanja „Revolusi Kiri”, revolusi Rakjat, revolusi A.P.R.!**” (Resopim penerbitan Dep. Pen. Pagina 9-10).

Selandjutnja dalam amanat „Tahun Kemenangan”, Presiden Soekarno mengemukakan tjanang sebagai berikut :

„Masih terlalu banyak instruksi<sup>2</sup> dan tindakan<sup>2</sup> Presiden jang ditudjukan untuk mobilisasi, mempersatukan dan mengikutsertakan kekuatan<sup>2</sup> Rakjat jang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh<sup>2</sup>, atau malahan diam<sup>2</sup> kadang<sup>2</sup> „didjegal” atau „disrimpung” oleh alat<sup>2</sup> negara sendiri. Satu tjontoh sadja misalnja mengenai pengerahan dan pemeratuan Rakjat melalui Front Nasional. Pekerdjaan Front Nasional sekarang ini kadang<sup>2</sup> digerowoti dan dipetjah-belah oleh orang<sup>2</sup> jang masih menderita sesuatu phobi. Malahan masih ada satu daerah, jang disitu itu belum dapat dibentuk Front Nasional daerah, karena adanja orang<sup>2</sup> jang komunisto-phobi!”

Dibagian lain dari amanat „Tahun Kemenangan” itu, Presiden Soekarno mentjanangkan sebagai berikut :

„Kewadajiban kita ialah harus terus-bersatu-padu dan terus bergotong-rojong sambil memegang teguh Manipol-Usdek dan Resopim itu, dan memperluas dan memperdalam pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim itu.

„Mengenai ini saja memperingatkan kepada satu hal jang kita harus waspada : Jaitu, kepada adanja orang<sup>2</sup> jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek dan Resopim, akan tetapi dalam prakteknja bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim. Waspadalah terhadap orang<sup>2</sup> jang demikian itu! Waspadalah! Sebab djikalau tidak, maka nanti **mudah tumbuh pengrongrongan revolusi dari dalam.**

„Djagalah supaja revolusi kita ini tetap murni dan segar !”

Demikianlah berbagai tjanang, jang telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno didalam Resopim dan didalam amanat „Tahun Kemenangan”.

Dengan memperhatikan dengan seksama tjanang<sup>2</sup> jang diberikan oleh Presiden Soekarno, maka mendjadilah djelas bagi massa Baperki, apa sebab dalam perdjjuangan Baperki melaksanakan program perdjjuangan dan program kerdja, jang berlandaskan garis Presiden Soekarno mengenai masalah golongan ketjil, Manipol dan Resopim, seringkali menghadapi berbagai hal jang terasa gandjil dan membingungkan. Sekarang kita memperoleh ketegasan dari Presien Soekarno sendiri, bahwa „masih terlalu banjak instruksi dan tindakan<sup>2</sup> Presiden, jang ditudjukan untuk mobilisasi, mempersatukan dan mengikut-sertakan kekuatan<sup>2</sup> Rakjat jang revolusioner, tidak dilaksanakan dengan sungguh<sup>2</sup> atau malahan diam<sup>2</sup> kadang<sup>2</sup> „didjegal” atau „disrimpung” oleh alat<sup>2</sup> negara sendiri”.

Dengan demikian pun mendjadilah djelas djuga, bahwa Baperki sebagai organisasi massa, jang menjediakan diri untuk mendjadi salah satu alat-revolusi, djadi wadajib tetap berusaha untuk membantu „mendjaga supaja Revolusi kita tetap murni dan segar”, jaitu dengan djalan jang telah ditundjukan dalam amanat „Tahun Kemenangan”, jaitu :

1. Harus terus bersatu-padu dan terus bergotong-rojong sambil memegang teguh Manipol-Usdek dan Resopim.
2. Harus memperluas dan memperdalam pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim.
3. Harus mempertinggi kewaspadaan terhadap orang<sup>2</sup> jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek-Resopim, tetapi didalam praktek bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim. Kewaspadaan dipertinggi untuk mentjegah pengrongrongan Revolusi dari dalam.
4. Harus ulet, tahan udji setjara revolusioner dalam usaha mengatasi kesulitan<sup>2</sup> jang dihadapi dalam usaha membantu mendjaga, supaja Revolusi kita tetap murni dan segar.

5. Harus bekerja lebih keras untuk membantu melenjapkan komunisto-phobi, sehingga Front Nasional betul<sup>2</sup> merupakan alat pemersatuan tenaga Rakyat revolusioner yang efektif.

Untuk dapat melaksanakan 5 matjam „harus” ini, terasa- lah, bahwa pelaksanaan indoktrinasi tentang Pantja Sila, Manifesto Politik dan semua Pedoman<sup>2</sup> Pelaksanaannya serta Resopim, amanat „Tahun Kemenangan” dan sedjarah pembentukan „Baperki” sebagai organisasi massa dan alat- revolusi, perlu sekali dilaksanakan setjara lebih intensif dari- pada selama ini. Dalam hubungan dengan ini, patut djuga diperhatikan, bahwa indoktrinasi itu meliputi djuga 9 matjam pokok, seperti diperintji dalam amanat „Tahun Kemenangan”, yakni :

1. Mengenai Revolusi.
2. Mengenai Pantja Sila Progressivisme.
3. Kepribadian Indonesia, yang berpusat kepada gotong- rojong, musjawarah & mufakat.
4. Persatuan Nasional Revolusioner dengan Front Nasional.
5. Membrantas komunisto-phobi.
6. Mutlaknja poros Nasakom.
7. Djahatnja liberalisme.
8. Satu pimpinan.
9. Sosialisme.

**Apa sebab tidak turut mendukung aliran „assimilasi total” & gerakan ganti nama ?**

Dalam rangka melaksanakan tugas Resopim dan amanat „Tahun Kemenangan” untuk mempertinggi kewaspadaan nasional guna mendjaga supaya Revolusi kita tetap murni dan segar, Baperki telah memperhatikan dan mengikuti dengan kritis gerakan dan usaha sementara orang, yang diumumkan sebagai gerakan „assimilasi total” dan yang menampakkan diri dalam bentuk andjuran ganti nama.

Tentu sadja timbullah pertanjaan : Bagaimana hasil tin-  
djauan kritis Baperki itu ?

Pertama-tama dapat dikemukakan, bahwa dalam memper-  
hatikan perkembangan sedjarah pembentukan „national state”  
didunia ini, maka kita akan melihat kenjataan, bahwa di  
Eropa Barat, dimana kapitalisme tumbuh setjara sangat pesat  
sekali dan lalu mendjadi pusat imperialisme, disanalah negara<sup>2</sup>  
itu umumnja berbentuk „mono national state”. Sekalipun ter-  
dapat suku, tetapi tidak ada golongan jang dinamakan  
„national minorities”. Di Eropa Timur sebaliknya kita me-  
ngenal „multi national states”, karena lambatnja pertum-  
buhan kapitalisme dalam masa peralihan feodalisme ke  
kapitalisme.

Di praktis semua negara, jang sebelum perang dunia ke-  
dua mendjadi djaduhan negeri<sup>2</sup> Eropa Barat, dan setelah  
perang dunia kedua memproklamasikan kemerdekaannja, kita  
melihat pembentukan „national state” jang mengenal dida-  
lamnja banjak djenis golongan ketjil, karena masjarakatnja  
mengandung banjak matjam golongan ethnik, disamping  
mengandung banjak matjam golongan agama.

Beda daripada nasionalisme Eropa Barat, jang mendjadi  
motor pendjaduhan dan imperialisme, nasionalisme diwila-  
jah A-A-A, ternjata adalah nasionalisme jang bangkit dan  
tumbuh dalam perdjjuangan menentang kolonialisme, menen-  
tang imperialisme, menentang rasialisme dan menentang  
chauvinisme. Dalam hubungan ini tentu baik sekali lagi kita  
perhatikan tjiri<sup>2</sup> jang harus dipenuhi oleh seorang patriot  
komplit, seperti jang didjelaskan oleh Presiden Soekarno  
depan para mahasiswa Indonesia di Djepang. Tjiri<sup>2</sup> itu  
adalah :

1. Tjinta kemerdekaan Tanah Air dengan kedaulatan penuh  
dalam tangan Rakjat Indonesia sendiri.
2. Tjinta kebebasan ekonomi nasional, jang mendjamin ke-  
makmuran adil bagi tiap orang warga-negara.
3. Tjinta kebudajaan sendiri, jang menolak pengaruh<sup>2</sup> buruk  
kebudajaan Asing.
4. Sanggup memperdjjuangkan setjara gigih penyelesaian

- revolusi sehingga terwujud masyarakat sosialis Indonesia.
5. Tegas anti - chauvinisme, anti - rasialisme menudju ke brotherhood of man.

Disamping semua ini, kita pun menghadapi kenyataan jang welo<sup>2</sup>, jang djelas sedjelas-djelasnja, bahwa Amerika Serikat, jang mendjalankan politik „melting pot” atau „kantjah lebur”, karena hendak melebur semua golongan ethnik jang berlainan untuk merupakan satu djenis golongan ethnik baru, hanja tidak dipaksakan, melainkan setjara sukarela, ternjata sehingga kini setelah merdeka 186 tahun lamanja belum berhasil menjelesaikan apa jang dikenal sebagai „negro problem”. Bahkan „negro problem” itu pada achir<sup>2</sup> ini masih dapat meletus mendjadi kekatjauan main kepruk dan membunuh orang<sup>2</sup> warga-negara Amerika Serikat dari golongan ethnik Negro jang ingin memperoleh kedudukan sebagai warga-negara A.S. setjara penuh.

Sebaliknja kita melihat, bahwa pelaksanaan sistem sosialisme, jang mengachiri „exploitation de l'homme par l'homme” di Uni Sovjet, di-negeri<sup>2</sup> sosialis Eropa Timur dan di RRT, ternjata dapat berhasil dalam tempo belasan tahun sadja mengachiri timbulnja persoalan golongan ketjil. Negeri<sup>2</sup> tsb tetap mengenal banjak matjam golongan ethnik besar dan ketjil, tetapi tidak pernah mengalami timbulnja persoalan golongan ketjil jang menarik perhatian dunia lagi.

Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa dalam masyarakat jang mengenal berbagai matjam golongan ethnik, dilaksanakannja dan terwujudnja masyarakat sosialis akan mengachiri persoalan<sup>2</sup> golongan ketjil. Masyarakat sosialis jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme tentu tidak akan mengenal lagi masalah golongan ketjil, jang biasanja timbul karena berlakunja sistim penindasan manusia oleh manusia.

Ini adalah kenyataan<sup>2</sup> jang kita lihat dalam mempeladjadi perkembangan usaha menjelesaikan masalah minority didunia kita ini. Kenyataan ini menimbulkan kesimpulan, bahwa jang penting bukanlah „assimilasi total” atau „peleburan total” atau „ganti nama” untuk mentjapai penjelesaian masalah

golongan ketjil, untuk mentjapai rasa sama harga antara semua warga-negara Indonesia dari golongan ethnik manapun djuga, melainkan memperhebat gotong-rojong untuk mempertjepat terwujudnja Amanat Penderitaan Rakjat, terwujudnja masjarakat sosialis, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme !

Walaupun kesimpulan diatas ini mestinja tjukup djelas bagi semua orang, tetapi kita pun harus menghadapi kenjataan, seperti jang disinjalir oleh Presiden Soekarno, jaitu dalam amanat „Tahun Kemenangan” bahwa „Pekerdjaan Front Nasional sekarang ini kadang<sup>2</sup> digerowoti dan dipetjah-belah oleh orang<sup>2</sup> jang masih menderita sesuatu phobi”. Phobi itu adalah komunisto-phobi ! Disamping ini tentu kita mesti menerima djuga sebagai kenjataan, bahwa dalam masjarakat kita masih ada djuga orang<sup>2</sup> jang dalam perkataan mengikuti Manipol-Usdek dan Resopim, tetapi dalam praktenja bertentangan dengan Manipol-Usdek dan Resopim.

Timbullah persoalan : Sikap apakah jang wadajib diambil oleh Baperki sebagai organisasi massa dan alat-revolusi ?

Seperti diterangkan diatas, Baperki telah menerima dengan suara bulat garis Presiden Soekarno tentang penyelesaian masalah minority seperti dirumuskan dalam amanatnja pada Kongres Baperki di Solo. Program perdjuangan dan program kerdja Baperki dengan sendirinja harus berlandaskan garis Presiden Soekarno itu.

Apabila kita bandingkan kesimpulan seperti dirumuskan diatas, jaitu bahwa tertjapainja masjarakat sosialis, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme akan mengachiri persoalan minority, dengan garis Presiden Soekarno, maka didapatlah kenjataan, bahwa menurut amanat Presiden Soekarno itu „terlaksananja pembangunan masjarakat jang adil dan makmur ini, Insja Allah akan terlaksanalah tjita<sup>3</sup> membangun „nation”, dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianaktirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan”. Karena masjarakat adil dan makmur itu sekarang sudah djelas adalah masjarakat sosialis, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme

par l'homme, maka garis Presiden Soekarno djadi memperkuat kesimpulan jang ditarik dari mempeladjar perkembangan masyarakat bangsa<sup>2</sup> didunia kita ini.

Seperti ditegaskan oleh amanat Presiden itu „ditindjau dari sudut ekonomi masalah golongan ketjil (minority problem) bagi negeri seperti Indonesia kita ini, sesungguhnya adalah satu masalah menghapuskan sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan mentjapai „full employment”, sehingga dengan demikian penyelesaian bukanlah dengan djalan mengadakan diskriminasi rasial atau main asli-aslian, melainkan dengan djalan memikirkan dan melaksanakan pembangunan setjara besar-besaran dengan mengerahkan seluruh kemampuan jang ada, baik berupa „technical skill” dan „managerial know how” dan modal jang tersedia di Indonesia”.

Oleh karenanja tugas Baperki dalam melaksanakan garis Presiden Soekarno itu adalah berusaha memperkokoh kesadaran, terutama dikalangan keturunan asing, bahwa untuk mentjapai penghargaan sama, untuk mentjegah berlangsungnja sistim anak-tiri dan anak-emas antara warga-negara Indonesia, jang terpenting ialah melaksanakan pengerahan, memobilisasi seluruh potensi jang ada setjara paling maximal, berupa technical skill, managerial know-how dan modal, djuga dari golongan keturunan asing, sehingga dapat diperlantjar proses mentjapai masyarakat sosialis, jang bersih dari sistim penindasan manusia oleh manusia. Praktek<sup>2</sup> diskriminasi rasial pada hakekatnja bersumber pada napsu iri-hati dan untuk melaksanakan penindasan manusia oleh manusia.

Berhasilnja usaha Baperki ini tentu menguntungkan proses revolusi kita menudju kemasjarakat adil dan makmur, jang bebas dari sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan jang mentjapai „full employment”, djadi menguntungkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat setjara sesungguhnya!

Jang dirugikan oleh usaha Baperki ini hanya musuh<sup>2</sup> revolusi Indonesia, tukang<sup>2</sup> tjatut Amanat Penderitaan Rakjat dan koruptor<sup>2</sup> Manipol-Usdek dan Resopim.

Selandjutnja, apabila kita perhatikan tingkat perkembangan revolusi kita sekarang ini jang bersifat nasional-demokratis, maka terasalah, bahwa kita semua memang harus

berusaha sekeras-kerasnja untuk memperkokoh persatuan segala kekuatan revolusioner dengan poros Nasakom. Dalam melaksanakan tugas revolusi ini kita semua berkewadajiban untuk memperkokoh dan meratakan kesadaran tentang tujuan dan tugas revolusi jang bersifat nasional-demokratis untuk kemudian meningkat mentjapai Indonesia ber-sosialis Indonesia, bersih dari exploitation de l'homme par l'homme. Dengan memperhatikan ketegasan dalam Djarek, bahwa tahap mentjapai Indonesia ber-sosialis Indonesia, bersih dari exploitation de l'homme par l'homme baru bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama, jaitu tahap nasional-demokratis diselesaikan seluruhnja.

Djadi dalam tahap revolusi jang sekarang ini kita perlu menggalang terkonsentrasinja seluruh kekuatan nasional. Ini tentu harus ditjapai dengan mendjauhkan sebanjak mungkin persoalan jang kurang perlu. Persoalan „assimilasi total” dengan bentuknja „mengandjurkan ganti nama”, pasti merupakan persoalan, jang memetjah belah terpusatnja pikiran dalam pengerahan seluruh funds & forces progressif, tanpa ada perlunja.

Hal ini kita akan rasakan setjara lebih njata pula, apabila kita perhatikan bahwa untuk mentjapai konsentrasi seluruh kekuatan nasional revolusioner, jang penting **bukanlah** „assimilasi total” atau „peleburan total” dari semua golongan ethnik dan golongan agama jang ada di Indonesia untuk mentjapai satu matjam djenis golongan ethnik dan golongan agama baru. Hal ini ternjata setjara tidak terbantah lagi kebenarannja, apabila kita perhatikan kenjataan, bahwa dalam tiap revolusi kita menghadapi kenjataan, bahwa orang<sup>2</sup> jang dinamakan „asli”, djadi bukan „produk asimilasi” bisa mendjadi pengchianat revolusi, bisa mendjadi kekuatan kontra revolusioner. Dalam revolusi kita sendiri, kita menghadapi kenjataan, bahwa orang<sup>2</sup> seperti Kartosuwirjo, Assaat, Natsir, Sjafrudin, Sumitro dll-nja lagi telah memimpin pemberontakan kontra-revolusioner. Djadi „keaslian” dan „assimilasi total” untuk mentjapai „taraf asli” **bukanlah** sjarat untuk mendjadi seorang kekuatan nasional revolusioner pendukung Manipol-Usdek dan Resopim

jang sedjati. Dengan sendirinja „nama” atau „suara nama” tidak merupakan sjarat untuk menentukan, apakah seorang bisa mendjadi kekuatan nasional revolusioner untuk mentjapai masjarakat sosialis.

Jang harus dikerdjakan adalah indoktrinasi jang lebih efektif, jang melaksanakan mental retooling setjara sedemikian rupa, sehingga tiap warga-negara, tanpa memandang asal keturunannya dan golongan ethnik atau agamanya, sadar dan yakin akan tudjuan revolusi kita dan sadar pula, bahwa tertjapainya tudjuan revolusi itu akan mendjamin kebahagiaan hidup jang sempurna bagi dirinja dan anak-tjutjunja. Adanja kesadaran dan kejakinan demikian itu jang merata akan mendjamin suksesnja pengerahan funds & forces progressif jang mendjadi tugas revolusi kita pada tingkat revolusi kita sekarang ini.

Berdasarkan alasan<sup>2</sup> diatas itu, maka Baperki dengan sendirinja tidak dapat mendukung gerakan „assimilasi total” dan tidak dapat menjetudjui „andjuran ganti nama”. Apalagi gerakan itu dapat menjelewengkan perhatian massa keturunan asing, jang djustru wadajib kita bimbing untuk turut dikerahkan dalam penggalangan konsentrasi seluruh kekuatan revolusioner menudju kemasjarakat sosialis berdasarkan Pantja Sila.

**Nasakom pun tegas menentang benih rasialisme !**

Dalam tahun<sup>2</sup> permulaan berdirinja Baperki dapat dikatakan seolah-olah praktis berdiri sendirian didalam usaha mempertegas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena nasionalisme Pantja Sila menentang kolonialisme dan menghendaki penghapusan imperialisme, terutama dalam menghadapi praktek<sup>2</sup> diskriminasi rasial sebagai akibat penjelewengan<sup>2</sup> dibidang ekonomi, jang achirnja mentjiptakan situasi untuk kembali ke UUD 1945.

Setelah kita berdiri atas landasan Manipol-Usdek dan Resopim, keadaan turut berubah. Berubah karena lebih meratanja kesadaran tentang tugas revolusi Indonesia, ten-

tang kekuatan<sup>2</sup> pokok pendukung revolusi Indonesia dan tentang tujuan revolusi Indonesia. Mendjadi djelasnja tiga kerangka revolusi Indonesia didalam Manifesto Politik membantu banjak untuk mentjegah penjelewengan dan untuk mengadakan koreksi terhadap penjakit<sup>2</sup> kanak<sup>2</sup> revolusi.

Baperki dalam perjuangannja untuk melaksanakan tjita<sup>2</sup>-nja pun tidak perlu merasa berdiri sendiri lagi. Memang, Baperki tidak berdiri sendiri, apalagi setelah Baperki mendjadi organisasi-anggota Front Nasional.

Usaha memperdjelas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena nasionalisme Indonesia bangkit dan tumbuh dalam perjuangan menentang kolonialisme dan perjuangan melikwidasi imperialisme, sekarang dilakukan oleh tokoh<sup>2</sup> Nasakom.

Seperti diketahui, Ali Sastroamidjojo S.H. sebagai tokoh nomor satu PNI, jang pernah mendjadi Ketua Konperensi A-A Pertama di Bandung sering mendjelaskan tentang nasionalisme Pantja Sila jang anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena menentang kolonialisme dan berusaha mentjiptakan dan memperkokoh setiakawan A-A jang menghendaki hapusnja kolonialisme dari muka bumi A-A.

Dalam kuliah umum didepan mahasiswa Baperki diaula Universitas Baperki, Ali Sastroamidjojo S.H. malahan djuga mempertegas, bahwa soal memilih nama adalah soal pribadi. Suara nama djuga tidak menentukan, apakah seorang patriot Indonesia sedjati atau bukan, karena Kartosuwirjo, Sumitro dll-nja ternjata adalah pemberontak jang hendak merubuhkan Republik Indonesia, jang kita semua tjintai.

Lain tokoh aliran nasionalisme, jang dengan tegas menentang berseminja rasialisme dan memandang andjuran ganti nama merupakan bentuk daripada rasialisme, adalah Asmara Hadi dan A. M. Hanafi dari Partindo.

Andjuran ganti nama setjara sukarela, jang didalam praktek dirasakan mengandung unsur „paksaan“ ditjela dalam sebuah statement resmi Partindo dan dinjatakan menimbulkan „bottle-neck“ jang merugikan usaha penge-

rahan funds & forces progressif sampai pada tingkat paling maximum.

Pendirian tokoh<sup>2</sup> agama mestinja tidak perlu disangsikan lagi, karena agama tidak mengenal batas rasial. Disamping itu dinegara kita ini, kita kenal banjak golongan agama, jang merupakan „minority” dan pelaksanaan ide „assimilasi total” dikalangan agama tentu tidak bisa tidak membawa akibat peleburan diri golongan<sup>2</sup> agama ketjil pada golongan agama jang besar setjara mutlak. Pikiran ini tentu tidak sesuai dengan sila : Ketuhanan Jang Maha Esa, jang mendjadi alat-pemersatu jang sama kuatnja seperti sila<sup>2</sup> lain, karena Pantja Sila sebagai keseluruhan harus merupakan alat-pemersatu jang kokoh dan tahan udji.

Sila Ketuhanan Jang Maha Esa sebagai alat-pemersatu menghendaki toleransi terhadap perbedaan agama. Memang, dalam mengutamakan persatuan, kita harus mempunyai djiwa toleran terhadap perbedaan<sup>2</sup>, termasuk perbedaan asal keturunan atau perbedaan golongan ethnik, sehingga perbedaan ini tidak merugikan usaha pemersatuan !

Pendirian ini dikemukakan setjara tegas oleh Menteri/Sekdjen PB Front Nasional, Saudara Sudibjo, jang mentjelaskan, bahwa usaha kaum imperialis memang hendak mentjiptakan petjah-belah dengan djalan apapun sadja dan untuk menjelewengkan perhatian massa pada sasaran tombak revolusi. Kaum imperialis dan kaki-tangannja tidak segan<sup>2</sup> untuk mengemukakan persoalan<sup>2</sup> „ganti nama”, asal sadja dapat menimbulkan perpetjahan. Front Nasional didirikan untuk mempertinggi kewaspadaan terhadap segala siasat divide et impera hingga ditjapai persatuan seluruh kekuatan nasional jang kompak dan sanggup melikwidasi imperialisme menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam kata sambutannya pada Pekan Karya Peladjar Baperki, Saudara Menteri/Sekdjen PB Front Nasional, Sudibjo dengan tegas menjatakan, bahwa suara nama tidak mendjadi persoalan dan dalam usaha membina konsentrasi seluruh kekuatan nasional asal keturunan pun tidak mendjadi persoalan.

Sedang dalam sambutannya tertulis pada peringatan Dies Natalis Ke-3 Universitas Baperki, Saudara Sudibjo sebagai Menteri/Sekdjen PB Front Nasional mempertegas, bahwa nasionalisme Pantja Sila adalah anti-rasialisme, anti-chauvinisme, karena sama halnya dengan nasionalisme Tiongkok seperti dijelaskan oleh Dr. Sun Yat Sen, nasionalisme Pantja Sila tumbuh dalam perjuangan menentang kolonialisme dan menentang imperialisme. Nasionalisme Pantja Sila menghendaki setiakawan the new emerging forces jang kokoh untuk mempertjepat likwidasi imperialisme dan mentjapai masjarakat dunia baru, seperti dijelaskan dalam Manipol.

Seperti diketahui Saudara Sudibjo, disamping Menteri/Sekdjen PB Front Nasional adalah seorang tokoh agama Islam jang terkemuka dan pendapatnja dapat dikatakan adalah tjukup representatief untuk dikatakan mewakili pendapat aliran Agama, chususnja agama Islam.

Pun tokoh aliran Komunis, seperti D.N. Aidit, Ketua C.C. PKI dalam banjak pernyataannja mempertegas memperhebat perjuangan menghapuskan rasialisme dan benih<sup>2</sup>nja. Dalam sambutannya pada Training Centre Gerwani, Saudara Aidit sebagai tokoh Nasakom, a.l. mempertegas berbagai pendapat, jaitu seperti terbatja dalam Harian Rakjat tgl 29-10-1962, sebagai berikut :

„Kaum reaksioner tidak suka persatuan nasional kita menjadi kuat. Oleh karena itu mereka tidak henti-hentinja menimbulkan perpetjahan dalam persatuan nasional kita. Disamping me-njebar<sup>2</sup>kan komunisto-phobia, Rakjat-phobia, dsb, mereka berusaha untuk me-ngobar<sup>2</sup>kan rasialisme. Dalam rangka mendjilat imperialis Amerika Serikat, chususnja dalam rangka mendapat kredit dari negara besar itu, sebagaimana djuga tuan Nehru di India, kaum reaksioner dinegeri kita terus-menerus mentjari kesempatan untuk me-ngobar<sup>2</sup>kan semangat anti-Tionghoa dan mempertentangkan warga-negara „asli” dan „tidak asli”.

„Tetapi untunglah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai tradisi jang baik dalam menentang rasialisme dan pembinaan nation Indonesia berdjalan bersama-sama dengan perjuangan menentang rasialisme. Sedjak Indische Partij

tahun 1912 kita sudah berdjuang melawan rasialisme dan Bung Karno sendiri adalah tokoh terkemuka dalam perdjungan melawan rasialisme.

„Bung Karno pernah dikritik oleh orang<sup>2</sup> chauvinist, ketika beliau memasukkan dua orang keturunan Tionghoa, jaitu Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe kedalam redaksi madjalah „Suluh Indonesia Muda“. Beliau menamakan kritik demikian itu sebagai pendirian orang jang „sempit budi“, sebagai „katak dibawah tempurung“.

„Tidak seperti kaum rasialis kita sekarang, Bung Karno pada waktu itu tidak mengandjurkan kepada Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe untuk mengganti nama mereka dengan nama „asli“ misalnja Badjigur atau Rudjak Sentul“.

„Rasialisme jang mempersoalkan penggantian nama adalah rasialisme jang paling koprot, paling tidak masuk akal, paling tidak ilmiah dan dinegeri kita telah menimbulkan banjak lelutjon dan kesedihan“.

Selanjutnja dipertegas djuga :

„Oleh karena itu kita harus terus memerangi rasialisme jang koprot itu. Bagi kita pasti masih lebih baik Drs. Khouw Bian Tie, anggota Staf Komando Operasi Ekonomi, jang namanja tidak „asli“ daripada Kartosuwirjo bekas kepala gerombolan DI-TII, jang namanja „asli“ atau dikira „asli“.

„Sesuai dengan tradisi anti-rasialisme kita, jang sudah setengah abad lamanja, marilah kita teruskan pendjungan melawan rasialisme, baik jang berbentuk purbasangka warna kulit, purbasangka keturunan maupun jang bentuknja paling rendah dan paling koprot, jaitu ganti nama, apalagi setjara paksa.

„Perdjungan melawan rasialisme adalah perdjungan untuk meniadakan kontradiksi jang tidak perlu dikalangan Rakjat dan ini berarti memperkuat persatuan nasional!“

Demikianlah pendapat<sup>2</sup> tokoh<sup>2</sup> terpenting dari Nasakom, jang membuktikan, bahwa Baperki dalam perdjungannja selama ini bukan khusus melukiskan rasa hati golongan ketjil setjara eksklusief, seperti dikira oleh setengah orang, melainkan ternjata melukiskan suara hati Rakjat terbanjak, jang

sedang berdjwang melikwidasi imperialisme menudju kearah terbentuknja masjarakat dunia baru, jang bersih dari kolonialisme, bersih dari imperialisme dan bersih dari penindasan manusia oleh manusia !

Seperti sudah sering didjelaskan, rasialisme adalah aliran, jang berpendirian, bahwa ketjakaan, kemampuan, dan kemadjuan seorang ditentukan oleh „ras“-nja. Aliran ini dengan sendirinja dapat mengakibatkan dua hal, jaitu membunui „ras“ jang tidak disukai, karena merusak „ras“ jang lain, jang dilakukan oleh Hitler dan merupakan perbuatan jang dikutuk oleh seluruh ummat manusia, atau berusaha „melenjapkan“ golongan „ras“ jang tidak disukai dengan djalan peleburan total atau asimilasi.

Dinegeri kita ternjata ada pengikut rasialisme, jang menganggap suara nama adalah tjiri „ras“ jang tidak disukai, terutama nama suara Tionghoa atau asal Tionghoa, jang menimbulkan andjuran untuk mengganti nama setjara „sukarela“. Rasialisme ini dinjatakan bentuk rasialisme paling koprot.

Rasialisme memang tidak ilmiah dan ketidak-ilmiahannja itu dibuktikan oleh empatbelas sardjana, jang diberi tugas oleh PBB untuk melakukan penjelidikan dan penelitian. Dalam buku-laporannja „Statement on Race“ dipertegas, bahwa menurut hasil penelitian ilmiah terbukti njata, bahwa tiap orang tanpa dipengaruhi oleh asal „ras“-nja, dalam keadaan suasana hidup sama, dengan memperoleh kesempatan madju dan mengembangkan bakatnja setjara sama, pasti dapat mentjapai tingkat kemadjuan jang sama pula.

Berdasarkan hasil penelitian ilmiah jang membantah kebenaran rasialisme, Baperki pernah menentukan untuk memperdjungkan suasana hidup sama, kesempatan madju sama dan kesempatan mengembangkan bakat sama bagi tiap orang warga-negara. Karena berdasarkan hasil penelitian ilmiah itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa tiap orang warga-negara, tanpa memandang asal keturunannja, dalam keadaan suasana hidup sama, kesempatan sama untuk madju dan mengembangkan rasa tjinta terhadap Tanah Air dan Rakjat Indonesia, pasti dapat mentjapai tingkat kemadjuan rasa

tjinta Tanah Air dan Rakjat Indonesia jang sama pula.

Djadi jang terpenting bukanlah „assimilasi total” untuk melenjapkan tjiri<sup>2</sup> „ras” tertentu atau „ganti nama”, melainkan mentjiptakan suasana hidup jang sama, kesempatan sama untuk maju dan mengembangkan bakat kemampuannya. Hal ini memang tidak mungkin dalam masjarakat, dimana berlaku sistim penindasan manusia oleh manusia. Karena pelaksanaan sistim exploitation de l'homme par l'homme itu menjebabkan suasana hidup dan kesempatan maju jang berlainan bagi golongan jang menindas dan bagi golongan jang ditindas.

Hal ini perlu kita sadari betul<sup>2</sup> dan oleh karenanja kita perlu memperbulat tjita<sup>2</sup>, bahwa hanja dengan terwujudnja masjarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat<sup>2</sup> „under-developed”, jang mentjapai „full employment” atau masjarakat sosialis, jang bersih daripada exploitation de l'homme par l'homme, kita akan dapat mewujudkan adanja keadaan suasana hidup sama, kesempatan sama untuk maju dan mengembangkan bakat bagi tiap orang warga-negara tanpa dipengaruhi oleh asal keturunannya atau golongan ethnisk serta agamanya.

Garis ini telah ditarik dalam rapat pendirian Baperki 9 tahun jang lalu dan wadjib kita perdjukungkan pelaksanaannya setjara lebih hebat karena memperdjukungkan pelaksanaan garis itu ternyata memperdjukungkan pelaksanaan garis Presiden Soekarno, seperti diamanatkan pada Kongres Baperki di Solo, memperdjukungkan pelaksanaan Manipol-Usdek dan Resopim setjara lebih intensif dan sungguh<sup>2</sup>.

Djadi dari meneliti beberapa hal penting, jang pernah kita putuskan untuk mendjadi landasan bagi rumusan program perdjungan dan program kerdja Baperki, ternyata setjara lebih tegas lagi, bahwa Baperki maju terus melalui djalan Pantja Sila dengan Manipol sebagai kompasnja untuk memperlantjar proses menudju kemasjarakat sosialis, jang pasti mengachiri praktek<sup>2</sup> rasialisme dengan berachirnja sistim exploitation de l'homme par l'homme.

## Baperki ikut aktif melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan”.

Sekarang marilah kita tjoba menindjau tugas Baperki sebagai organisasi massa dan anggota Front Nasional dalam rangka pelaksanaan amanat „Tahun Kemenangan”.

Kita semua tentunja telah mempeladjar isi amanat „Tahun Kemenangan” itu. Walaupun demikian ada manfaatnja untuk mengemukakan berbagai ketegasan jang dikemukakan dalam amanat „Tahun Kemenangan” itu.

Pertama-tama ketegasan, bahwa kita berhasil memasuki „Tahun Kemenangan” setelah kita berhasil mengachiri djaman penjelewengan dan menentukan landasan Manipol-Usdek dan Resopim dengan kemudi dan bimbingan ide sosialisme.

Dipertegas, bahwa „kita berdjalan terus atas Landasan Manipol-Usdek-Resopim! Dan landasan ini akan tertanam subur, akan tumbuh subur! Sekali landasan itu bermahkota dalam kalbunja Rakjat, sekali ia laksana Wahyu Tjakraningrat bermahligai dalam api-djiwa Rakjat, maka Indonesia jang Djaja Raja, Indonesia jang Adil Makmur, akan mendjadilah kenjataan sampai achir djaman. Dan tidak akan ada satu kekuatan duniawipun jang akan dapat merongrong atau menghantjurkan Indonesia dalam bentuk sematjam itu!”

Menerima ketegasan ini berarti, bahwa kita wadjib kerdja keras untuk membikin tumbuh subur landasan Manipol-Usdek dan Resopim, sehingga landasan itu bermahkota dalam kalbu Rakjat.

Tetapi disamping kerdja keras untuk melaksanakan indoktrinasi, kita pun wadjib kerdja keras untuk mempersatukan segala funds and forces. Untuk keperluan ini ditegaskan kita perlu meninggalkan demokrasi parlementer, jang mengandung prinsip adu-domba antara golongan dengan golongan, antara individu dengan individu. Lebih<sup>2</sup> dalam abad sekarang ini, dimana imperialisme sedang mereteli, prinsip adu-domba dari liberale parlementaire democratie itu dieksploitir oleh subversi asing guna kepentingan sendiri.

Kita pun wadajib meninggalkan ekonomi liberal dan tegas menudju ke ekonomi sosialis, jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme jang menjanggupkan pada Rakjat djelata si Dadap, si Waru, si Suta, si Naja satu kehidupan jang adil dan makmur, satu kehidupan jang tata-tentrem karta-rahardja!

Dalam menghadapi pelaksanaan perdjandjian Indonesia-Belanda amanat „Tahun Kemenangan” mempertegas: „..... kami dari fihak Indonesia terpaksa tetap waspada, tetap dalam posisi perdjjuangan, dalam „stelling”, tetap dalam Trikora, tetap sampai ada kenjataan<sup>2</sup> jang njata, bahwa ini kali persetudjuan Indonesia-Belanda itu benar<sup>2</sup> dilaksanakan setjara djudjur dan tidak a la Renville dan Linggardjati”.

Didjelakan dalam amanat „Tahun Kemenangan”, bahwa hampir<sup>2</sup>  $\frac{3}{4}$  dari kegiatan Nasional kita pergunakan untuk menjelesaikan keamanan dan mendjalankan Trikora. Inilah sebabnja kita sekarang menghadapi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi. Sekarang soal keamanan dan Irian-Barat itu boleh dikatakan selesai, maka bottlenecks dan kesulitan<sup>2</sup> dari persoalan ekonomi harus sanggup diatasi dalam waktu pendek dan tidak terlalu pandjang.

Ditegaskan, bahwa untuk lantjarnja program ekonomi perlulah kita benar<sup>2</sup> menjingkirkan beberapa penjakit. „Di-antara penjakit<sup>2</sup> itu, jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat<sup>2</sup> negara jang bersangkutan”.

Disamping usaha membasmi komunisto-phobi, Rakjat-phobi untuk dapat memperlantjar pembentukan Dewan<sup>2</sup> Perusahaan, melaksanakan Bagi-Hasil, Landreform serta mengikut-sertakan Rakjat, terutama wakil<sup>2</sup> buruh dan tani dalam usaha<sup>2</sup> mempertinggi produksi dan memperlantjar distribusi, dalam amanat „Tahun Kemenangan” dipertegas, bahwa „Kita harus merdeka agar kita bisa leluasa bertjantjuti-wondo menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka, agar supaja kita bisa leluasa mendirikan satu masjarakat baru jang tiada kapitalisme dan imperialisme”. Djadi Rakjat harus bisa „kiprah” sehebat-

hebatnja untuk dapat menghandjut stelsel kapitalisme/imperialisme serta kakitangan<sup>2</sup>nja didalam negeri dan menghandjut kaum kapitalis-birokrat jang menimbulkan mismanagement pada perusahaan<sup>2</sup> negara/korupsi.

Ketegasan lain jang perlu diperhatikan adalah perlu terus memperhebat mobilisasi, mempersatukan dan mengikut-sertakan kekuatan<sup>2</sup> Rakjat jang revolusioner dengan menjempurnakan Front Nasional sehingga Front Nasional dapat berkerdja lebih efektif lagi.

Kita tetap perlu waspada dan mendjaga supaya revolusi kita tidak dirongrong dari dalam, supaya revolusi kita tetap murni dan segar!

Pun dipertegas djuga, bahwa tudjuan revolusi Indonesia adalah „congruent with social conscience of man” atau „kongruen dengan budi-nurani kemanusiaan”. Oleh karena-nya revolusi Indonesia mempunyai Universal Voice, mempunyai Suara Sedjagad! Karena itulah maka Indonesialah dipersilahkan oleh negara<sup>2</sup> Asia-Afrika untuk mengambil iniatief mengadakan konperensi Asia-Afrika jang kedua.

Dalam menghadapi ketegasan<sup>2</sup> itu dalam amanat „Tahun Kemenangan”, kita perlu memperhatikan djuga kemadjuan<sup>2</sup> njata jang kita hadapi, jaitu a.l. :

1. Pelaksanaan perdjandjian Indonesia-Belanda sudah memasuki taraf penjelenggaraan kekuasaan administrasi atas Irian-Barat oleh Untea dan seorang tokoh Iran telah diangkat sebagai penguasa PBB di Irian-Barat.

2. Utusan<sup>2</sup> dari Rakjat Irian-Barat jang menindjau keadaan Ibu-kota dan wilajah jang telah merdeka, menimbulkan reaksi<sup>2</sup> spontaan, jang menguntungkan usaha mentjegah/mengachiri gerakan separatisme dan mempertjepat pelaksanaan pulihnja kekuasaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan atas wilajah Irian-Barat.

3. Pemulihan keamanan ternjata memperluas tanah, jang dapat dikerdjakan untuk mempertinggi produksi dan memperlantjar lalu-lintas barang.

4. Pemberantasan buta-huruf telah menghasilkan banjak daerah bebas buta-huruf, sehingga djumlah buta-huruf, jang

Jidjaman Belanda mentjatat 92%, sekarang hanja tinggal 10% sadja.

5. Presiden telah menentukan, bahwa keadaan SOB (Darurat Perang) sudah berachir sebelum bulan Mei 1963. Karena waktu peralihan menurut UU Keadaan Bahaja adalah 6 bulan, maka putusan mengachiri keadaan SOB setjara berangsur atau sekaligus tentunja sudah ditentukan sebelum berachirnja bulan Nopember 1962 ini.

Dengan memperhatikan semua ini, maka lalu timbullah pertanjaan: Apakah tugas Baperki?

Berdasarkan ketegasan<sup>2</sup> didalam amanat „Tahun Kemenangan“, seperti antara lain jang dikutip diatas itu, maka pada umumnja dapat dinjatakan, bahwa tugas Baperki adalah:

1. Membantu dan berusaha untuk memperhebat persatuan nasional jang berporoskan Nasakom.

Untuk mentjapai ini terasa perlu diusahakan setjara lebih sungguh<sup>2</sup>: pengertian jang djelas dan merata tentang:

- a. Revolusi Indonesia;
- b. Pantja Sila dan Progressivisme;
- c. Kepribadian, Indonesia jang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah dan mufakat;
- d. Persatuan Nasional Revolusioner;
- e. Perlunja memberantas komunisto-phobi;
- f. Mutlak perlunja Nasakom;
- g. Djahatnja liberalisme
- h. Satu Pimpinan Nasional;
- i. Sosialisme.

Djadi mengintensifikasi indoktrinasi Manipol-Usdek dan Resopim. Untuk keperluan ini Pengurus Pusat Harian telah mengadakan hubungan dengan Prof. Dr. H. Ruslan Abdulgani sebagai Ketua Pembina Djiwa Revolusi Nasional, sekarang Wampa Bidang Khusus tentang kemungkinan melaksanakan indoktrinasi dikalangan kader Baperki, supaja mereka dapat membantu pelaksanaan indoktrinasi setjara lebih intensif.

2. Berusaha setjara lebih sistematis untuk membantu berkembangnja Front Nasional Pusat dan Daerah, hingga dapat bekerdja lebih efektif sebagai alat-pemersatu, alat-konsentrasi seluruh kekuatan nasional revolusioner dan merupakan djuga alat membantu melaksanakan „social control” dan „social support” jang sungguh<sup>2</sup> efektif, jang membikin lebih efisien pelaksanaan pembangunan<sup>2</sup> menudju kemasjarakat sosialis.

3. Menjempurnakan pelaksanaan hak<sup>2</sup> demokrasi Rakjat dalam rangka menjempurnakan pelaksanaan demokrasi ter-pimpin jang efisien dalam wujud „social control” efektif sebagai pelaksanaan ke-„kiprah”-annja Rakjat se-hebat<sup>2</sup>nja untuk dapat menghandjut habis-habisan kaum imperialis dan kakitangan<sup>2</sup>nja didalam negeri, untuk dapat menghandjut habis-habisan kaum kapitalis-birokrat jang menimbulkan mismanagement dan korupsi.

4. Mempertinggi kewaspadaan nasional revolusioner, jang menguntungkan usaha mendjaga supaja Revolusi kita murni dan segar, tidak dirongrong dari dalam.

Pelaksanaan usaha<sup>2</sup> diatas tadi itu tentu akan dipengaruhi baik dan berkembang lebih tjepat lagi dengan pentjabutan keadaan darurat perang (SOB), jang sudah diputuskan oleh Presiden akan berlaku efektif sebelum bulan Mei 1963.

5. Menjempurnakan program perdjjuangan Baperki, sehingga pelaksanaan program perdjjuangan itu disesuaikan dengan semangat perdjjuangan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan”.

#### **Penjelesaian masalah kewarga-negaraan berdasarkan Manipol.**

Seperti diketahui, Kongres Baperki telah merumuskan tiga program perdjjuangan Baperki, jaitu :

- a. Menjelesaikan masalah kewarga-negaraan umumnja dan pelaksanaan perdjandjian RI-RRT setjara menguntungkan usaha memperbesar potensi nasional ;
- b. Memperdjjuangkan perkembangan ekonomi nasional, jang

mendjamin kesempatan maju sama dalam usaha mempertinggi daya produksi nasional dengan memperhatikan terutama usaha<sup>2</sup> koperasi produksi ;

- c. Memperluas kegiatan<sup>2</sup> dibidang pendidikan dari tingkat sekolah Rakjat sampai tingkat perguruan tinggi, jang bertudjuan memperbesar dan memperluas technical skill dan managerial know how jang dapat dikerahkan buat memperlantjar pembangunan<sup>2</sup> menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam meneliti kembali program perdjjuangan ini untuk disempurnakan, terutama disesuaikan dengan perdjjuangan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan”, dapat dikemukakan pertimbangan<sup>2</sup> sebagai berikut :

Mengenai program pertama tentang penjelesaian masalah<sup>2</sup> kewarga-negaraan umumnja dan pelaksanaan perdjandjian persetudjuan penjelesaian dwi-kewarga-negaraan antara RI-RRR pokok pendirian jang telah ditetapkan oleh Baperki masih tetap tepat.

Pendirian Baperki jalah, supaja penjelesaian masalah<sup>2</sup> kewarga-negaraan itu ditjapai setjara sedemikian rupa, sehingga selalu memperbesar potensi nasional kita, baik dalam djumlah, maupun dalam skill dan modal. Pendirian ini membawa akibat, bahwa perlu ada kegiatan<sup>2</sup> jang ditudjukan untuk membantu orang<sup>2</sup> keturunan asing memperoleh kewarga-negaraan Indonesia dan dalam mendjadi warga-negara Indonesia ia mendjadi warga-negara jang baik, jang berguna, jang berdjawa Manipol dan mengembangkan rasa tjinta Tanah Air jang sanggup menjelesaikan revolusi kita menudju kemasjarakat adil dan makmur.

Baperki berpendirian berdasarkan hasil penjelidikan ilmiah dari para sardjana jang ditugaskan oleh PBB, jang dirumuskan dalam laporan dengan djudul „Statement on Race”, bahwa tiap orang warga-negara, tanpa memandang asal keturunannja, pasti dapat mentjapai tingkat perkembangan tjinta Tanah Air dan mengabdikan pada Rakjat jang sama, dengan adanja suasana penghidupan jang sama dan kesempatan

jang sama untuk maju dan mengembangkan rasa tjinta Tanah Airnja dan kemauan mengabdikan diri pada Rakjat.

Berdasarkan kenjataan, bahwa Baperki merumuskan pendiriannja berdasarkan garis Presiden tentang penjelesaian golongan ketjil seperti dirumuskan dalam amanat Presiden pada Kongres Baperki, maka Baperki dalam memperdjuangkan penjelesaian masalah<sup>2</sup> kewarga-negaraan tetap meletakkan titik-berat pada usaha mobilisasi seluruh technical skill, managerial know how dan modal jang tersedia didalam negeri sampai pada tingkat paling maximum untuk memperlantjar proses pembangunan „nation”, jang berwujud masyarakat adil dan makmur, dimana tiap orang warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari segala matjam prasangka keturunan, bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Masyarakat ini bersih dari sifat<sup>2</sup> „under-developed” dan mentjapai „full employment”. Dalam rumusan Manipol masyarakat itu adalah masyarakat sosialis, jang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme!

Mengenai penjelesaian dwi-kewarga-negaraan RI-RRT berdasarkan perdjandjian Indonesia-RRT, Baperki tetap berpendirian, bahwa perdjandjian itu hendaknja dilaksanakan dengan dua tudjuan :

1. Menguntungkan usaha memperbesar potensi nasional kita.
2. Menguntungkan pelaksanaan kerangka ke-3 dari revolusi kita menurut Manipol, jaitu „Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara<sup>2</sup> Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdja-sama membentuk satu Dunia Baru, jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna”.

Didalam pelaksanaannja Baperki selalu memperdjuangkan pelaksanaan prinsip „tjaranja memilih harus sederhana”, karena dengan tjara memilih jang sederhana akan melenjapkan kesulitan<sup>2</sup> warisan djaman pendjadjahan, terutama kurang sempurnanja administrasi penduduk didjaman kolonial.

Berdasarkan pendirian itu Baperki telah berhasil mentjapai tertjantumnja pasal V dalam Peraturan Peralihan UU No. 62/1958 tentang kewarga-negaraan Indonesia, jang praktis memberi kesempatan pada mereka, jang pada waktu antara tanggal 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951, masih belum dewasa untuk memilih kembali kewarga-negaraan Indonesia, apabila ia mendjadi asing akibat tindakan orang-tuanja.

Dan berdasarkan pendirian itu djuga Baperki menjambut dengan gembira diperluasnja golongan jang berdwi-kewarga-negaraan dengan mereka jang pada waktu 27-12-1949 dan 27-12-1951 masih belum dewasa, sekalipun perluasan ini kemudian dipersempit kembali dengan adanya tambahan ketentuan dalam PP No. 5-1961 pasal I, jaitu sebagai berikut : „ ..... dengan pengertian, bahwa jang diperbolehkan menjatakan keterangan tsb hanja mereka jang belum pernah meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa idjin-kembali (re-entry permit) atau belum pernah meninggalkan wilayah Indonesia selama waktu jang melebihi djangka waktu idjin-kembalinja, semendjak penolakan dari atau oleh orang-tuanja”.

Dalam memperhatikan laporan<sup>2</sup> dari Tjabang<sup>2</sup> Baperki, jang ikut aktif membantu orang<sup>2</sup> jang bersangkutan untuk memperlantjar penyelesaian dwi-kewarga-negaraan, dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. „Tjaranja memilih sederhana”, diberbagai daerah seringkali tidak sederhana karena prosedur memperoleh surat keterangan lahir seringkali makan banjak waktu, disamping banjak ongkos, jang atjapkali diluar kemampuan untuk membajar dari orang<sup>2</sup> jang bersangkutan.

Orang<sup>2</sup> jang termasuk golongan „mampu” praktis sudah selesai surat<sup>2</sup>nja jang berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian dwi-kewarga-negaraan.

Jang masih belum selesai surat<sup>2</sup>nja djusteru adalah mereka jang termasuk golongan ekonomis lemah.

Dalam menghadapi kenjataan ini, maka Baperki berusaha untuk mohon kebidjaksanaan pemerintah untuk melaksanakan prinsip „tjara memilih sederhana” bagi orang<sup>2</sup> jang te-

rang tergolong „kurang mampu” itu sedemikian rupa, sehingga surat keterangan lahir yang diberikan oleh lurah, yang disahkan oleh tjamat dapat berlaku sebagai keterangan dilahirkan di Indonesia, yang diperlukan oleh hakim untuk menentukan, apakah yang bersangkutan betul berwarga-negara rangkap ataukah tidak.

Pembagian formulir C dan D dapat dikatakan tjukup memuaskan dengan adanya bantuan dan pengertian dari fihak Pamong Prodjo, terutama dari fihak Departemen Dalam Negeri dan Panitia Pemilihan Indonesia.

3. Pelaksanaan Peraturan Peralihan pasal V dari UU No. 62/1958 ternyata seringkali dihubungkan dengan Pelaksanaan Penyelesaian Dwi-kewarga-ngaraan dari Peraturan Pemerintah No. 20/1959 pasal 1 ayat 1 (baru, sebagai akibat tambahan PP No. 5/1961) dan masih belum lantjar seperti yang diharapkan.

Ketidak-lantjaran ini disebabkan oleh pelaksanaan „tambahan” rumusan yang mempersempit djumlah orang<sup>2</sup> yang bersangkutan, jaitu „tambahan” yang berbunyi: „Dengan pengertian etc. etc.” seperti dikutip diatas tadi.

Apabila kita perhatikan laporan Susanto Tirtoprodjo S.H., Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Panitia Bersama RI-RRT, jaitu didalam bukunya yang berdjulud „Hasil Kerdja Panitia Bersama”, maka ketidak-lantjaran itu kemungkinan besar sekali karena masih ada sematjam „komunisto-phobi” dikalangan alat-negara yang wadjib melaksanakannya, disamping kekurangan tenaga pada alat-negara untuk melaksanakan penelitian sebagai akibat „tambahan” rumusan yang mempersempit itu.

Pendapat ini berdasarkan pendjelasan dari Susanto Tirtoprodjo S.H. dalam bukunya, yang menuturkan sedjarah „tambahan” itu sebagai berikut:

„Baru pada tanggal 22 November 1960 Ketua Delegasi RI dalam Panitia Bersama diberi kesempatan memberi pendjelasan tentang Rentjana Tjara-Pelaksanaan yang telah selesai tersusun itu dalam sidang kabinet.

„Maka ternjatalah, bahwa dalam kabinet terdapat oposisi, terutama terhadap pasal 1 ayat 2 Rentjana Tjara-Pelaksa-

naan, jang memberikan kesempatan kepada anak<sup>2</sup> belum dewasa diantara tanggal 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951, karena mengikuti orang-tuanja atau oleh orang-tuanja ditolakkan kewarga-negaraan RI-nja, telah mendjadi warga-negara tunggal RRT untuk melakukan pemilihan antara kewarga-negaraan RI dan kewarga-negaraan RRT, sehingga memperoleh kewarga-negaraan tunggal RI.

„Adapun alasanja ialah karena dichawatirkan, bahwa beribu-ribu pemuda Tionghoa jang sudah pulang kembali ke Tiongkok dan disana telah „di-indoktrinasi” dengan ideologi komunisme, akan kembali lagi ke Indonesia sebagai warga-negara RI.” (katja 17).

Dalam katja 18, Susanto Tirtoprodjo S.H. mendjelaskan lebih djauh sebagai berikut :

„Sedang Panitia ad hoc itu sibuk membahas dan menjusun usul<sup>2</sup> perobahan, maka pada tanggal 29 Nopember 1960, Presiden memanggil Dutabesar RI di Peking, Soekarni, bekas Dutabesar RI di Peking, Mononutu dan Ketua Delegasi RI dalam Panitia Bersama, dalam pertemuan mana Presiden memberikan dorongan supaya Rentjana Tjara-Pelaksanaan segera ditandatangani dengan alasan politis segera menjlesaikan persoalan dwi-kewarga-negaraan dengan RRT untuk memelihara semangat persahabatan dengan negara jang benar<sup>2</sup> sahabat kita itu. Berpesanlah Presiden supaya kita berdjiwa besar, berfikir setjara luas dan djanganlah memandang persoalan ini sampai details jang ketjil<sup>2</sup>, antara lain dengan kata : „Seandainja betul beribu-ribu pemuda RRT jang sudah di-indoktrinasi dengan ideologi komunisme akan kembali lagi masuk Indonesia sebagai warga-negara RI, kita tidak usah takut<sup>2</sup>, karena sekarangpun sudah ada 8 djuta warga-negara RI jang berhaluan komunis”.

„Untuk melaksanakan dorongan Presiden itu, maka Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio memberikan instruksi kepada saja untuk setjara informil membitjarakan dengan Dutabesar Huang Chen usul<sup>2</sup> perobahan jang diadjukan oleh Panitia ad hoc.

„Pembitjaraan informil itu terdjadi pada tanggal 3 Desember 1960. Adapun hasil dari pembitjaraan itu ialah :

„1. Mengenai pasal 1 ayat 2 Rentjana Tjara-Pelaksanaan, usul jang diadjukan supaja anak<sup>2</sup> diantara 27 Desember 1949 dan 27 Desember 1951 belum dewasa diperbolehkan memilih lagi mendjadi warga-negara RI itu dibatasi hanja mereka jang selalu tetap bertempat tinggal diwilajah Republik Indonesia, oleh Dutabesar Huang Chen dinjatakan tidak perlu, karena dalam pandangan RRT memang itulah jang dimaksudkan. Ditambahkannya pula, bahwa mereka jang mendjadi warga-negara RRT tunggal dan telah pulang ke Tiongkok tidak akan kembali ke Indonesia. Meskipun demikian, RRT berkeberatan untuk memuat pembatasan jang diusulkan oleh Panitia ad hoc itu dalam Rentjana Tjara-Pelaksanaan, karena jang sedemikian itu mengandung unsur ketidak-kepertjajaan terhadap RRT”.

Demikianlah pendjelasan Susanto Tirtoprodjo S.H., jang sebagian sudah pernah dikutip dalam laporan konperensi jl, tetapi untuk mengerti ketidak-lantjaran jang dihadapi sekarang ini terasa baik sekali, apabila kita memahami sedjarah „tambahan” jang bersifat membatasi itu. Memang, menjedihkan ! Walaupun sudah **dibatasi**, tetapi pelaksanaannya belum djuga lantjar dan ribuan pemuda harus menantikan penyelesaian surat<sup>2</sup>nja jang belum dapat diselesaikan oleh alat-negara kita.

Dengan mengetahui dan mengerti sedjarah terdjadinja „tambahan” tsb, maka kita tentu lebih merasakan penting artinja ketegasan Presiden Soekarno dalam amanat „Tahun Kemenangan” tentang „bottle-necks” jang diakibatkan oleh „terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon dalam hati dan kepala setengah alat<sup>2</sup> negara jang bersangkutan”. Usaha membantras komunisto-phobi dan usaha memperhebat gotong-rojong seluruh kekuatan revolusioner dengan poros Nasakom terasa penting sekali dan berhasilnja usaha ini dapat diharapkan akan memperlantjar pelaksanaan penyelesaian dwi-kewarga-negaraan setjara menguntungkan usaha pengerahan funds and forces progressif sampai pada tingkat paling maximum dan setjara menguntungkan usaha pelaksanaan kerangka ketiga revolusi kita.

Usaha<sup>2</sup> Tjabang Baperki untuk membantu kelantjaran penyelesaian dwi-kewarga-negaraan RI-RRT itu ternyata perlu dilandjutkan dengan bekerdja setjara lebih teliti karena telah memperoleh banjak pengalaman kerdja. Dalam hubungan ini tentu perlu sekali diperhatikan, bahwa tiap tahun ada pemuda, jang meningkat usia 18 tahun dan perlu dibantu penyelesaian surat<sup>2</sup> kewarga-negaraan Indonesia tunggalnja.

Disamping itu tentu sadja perlu diperhatikan ketentuan pasal 10 Persetudjuan tentang Tjara-Pelaksanaan, jang dirumuskan dalam Pasal III P.P. No. 5/1961, jang mengakibatkan adanja Pasal 4A baru dalam P.P. No. 20/1958. Bunjinja adalah sebagai berikut :

„Seorang jang pernyataan keterangannja ditolak dengan pasti dapat dalam djangka waktu satu bulan setelah ditolaknya pernyataan keterangan itu, mengadjukan permohonan kepada Panitia Bersama Perdjangjian Dwi-kewarga-negaraan antara RI dan RRT, supaja soalnja diperiksa dan djika oleh Panitia Bersama tsb dipandang beralasan, maka soalnja dapat diadjukan kepada Menteri Kehakiman jang bersangkutan dengan usul penolakan tsb ditindjau dan diurus kembali”.

Pasal ini diperhatikan untuk mentjegah terdjadinja penolakan keterangan jang disebabkan karena kekurangan keterangan berhubung dengan keadaan administrasi penduduk warisan pendjadjahan Belanda, jang mengandung banjak kelemahan.

**Baperki wadjib ikut aktif dalam usaha menanggulangi kesulitan ekonomi.**

Dalam merumuskan program pasal kedua Baperki menggunakan sebagai landasan garis Presiden Soekarno tentang penyelesaian masalah golongan ketjil, jang menugaskan pengerahan segala technical skill, managerial know how dan modal jang tersedia didalam negeri untuk membangun masjarakat adil dan makmur, jang tidak mengenal lagi sifat<sup>2</sup> „underdeveloped” dan mentjapai „full employment”, sehingga tiap warga-negara dapat menuntut penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari segala matjam pra-

sangka keturunan dan bebas dari rasa takut akan menderita kekurangan. Masyarakat adil dan makmur itu sekarang dipertegas adalah masyarakat sosialis, yang mengachiri sistim exploitation de l'homme par l'homme.

Proses peralihan masyarakat yang sekarang ini menuju kemasyarakat sosialis itu memerlukan waktu dan akan dilakukan tahap demi tahap dengan pelaksanaan Rentjana<sup>2</sup> Pembangunan Nasional Semesta.

Tetapi dalam melaksanakan proses ini, kita pun menghadapi kelemahan<sup>2</sup> umum dan persoalan<sup>2</sup> umum, yang dirasakan oleh negeri<sup>2</sup> yang muda dan yang pernah mengalami kekuasaan pendjadjahan yang lama, seperti halnya Indonesia kita ini. Kelemahan<sup>2</sup> dan persoalan<sup>2</sup> itu antara lain adalah :

1. Kekurangan tenaga yang terlatih baik untuk mengembangkan politik ekonomi yang bebas, melaksanakan berbagai matjam rentjana pembangunan, menjusun dan melaksanakan rentjana<sup>2</sup> industrialisatie, memperluas hubungan dagang dengan negeri<sup>2</sup> lain setjara bebas, mengurus dan mengatur peredaran mata uang sendiri, yang perlu dipertahankan baik nilai tukarnya. Tenaga<sup>2</sup> yang diperoleh dari warisan pendjadjahan memang baik untuk keperluan mendjalankan roda pemerintahan pendjadjahan, yang mesti mentjiptakan suasana baik untuk keperluan perdagangan dan investment kolonial. Tetapi untuk keperluan melaksanakan aspiratie nasional, yang menyebabkan ditjetuskannya proklamasi kemerdekaan, terasa tenaga<sup>2</sup> warisan pendjadjahan itu mengandung kelemahan<sup>2</sup> pokok.

2. Sifat produksi industri setelah perang dunia kedua mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Revolusi industri yang dihadapi oleh ummat manusia sekarang ini wataknja memang berlainan daripada revolusi<sup>2</sup> industri duluan diabad ke-18 dan abad ke-19. Terutama beda dalam ketergantungannya pada hasil<sup>2</sup> penjelidikan yang mesti dilakukan setjara tekun terus-menerus, beda dalam kebutuhan akan tenaga manusia dan kebutuhan akan modal dan djuga pengaruhnja pada masyarakat. Sifat produksi industri itu mempunyai watak yang berlainan. Orang yang hidup pada permulaan abad ke-20 ini tidak berani mengimpikan, bahwa

setelah pertengahan abad ke-20 ini dapat terdjadi perubahan<sup>2</sup> besar dalam sifat produksi industri seperti jang disaksikan sekarang ini. Untuk memungkinkan revolusi industri bergerak terus bukan sadja ilmu pengetahuan dan technology harus diselami setjara mendalam dan diperluas, melainkan djuga djumlah manusia jang harus di-ikut-sertakan meliputi djumlah percentage jang terus meningkat. Sebagai semua negara A-A pada umumnja Indonesia masih terbelakang dalam hal menguasai ilmu pengetahuan dan technology. Djadi harus berusaha untuk menjusul keterbelakangan ini dalam waktu sesingkat mungkin.

3. Dalam usaha mengembangkan industri dan mengintensifkan usaha menggali kekajaan alamnja untuk mentjapai ekonomi jang bebas dan seimbang (independent and balanced economy) ternyata sangat tergantung pada inisiatif negara, karena modal nasional swasta pada umumnja di-negeri<sup>2</sup> Asia-Afrika belum tumbuh tjukup kuat untuk melaksanakannja sendiri. Pada umumnja memang terasa dialami kekurangan modal dan technical skill.

Dalam hubungan dengan ini „bantuan” ekonomi dari negeri<sup>2</sup> asing merupakan satu masalah jang ruwet. Terutama setelah Rakjat A-A pada umumnja memperhatikan pengalaman Kuomintang di Tiongkok. Bantuan raksasa Amerika Serikat pada Kuomintang di Tiongkok antara tahun 1945-1948 hanja membawa akibat memperkaja sedjumlah ketjil pembesar korup dan mentjiptakan klas kontraktor dan perantara jang memperluas djurang pemisah antara Rakjat dan pemerintahan dengan akibat Rakjat menggulung pemerintahan jang korup. Pengalaman selama kekuasaan Kuomintang di Tiongkok dan pengalaman dari negeri<sup>2</sup> A-A-A setelah perang dunia II menimbulkan kejakinan jang merata di Rakjat<sup>2</sup> A-A-A, bahwa bantuan uang asing tanpa ada pemerintahan Rakjat jang sesungguhnya serta tanpa ada rentjana pembangunan jang diperintji djelas ternyata selalu merupakan sumber korupsi besar-besaran bagi orang<sup>2</sup> jang mengurusnja dan ternyata tidak membantu berkembangnja industrialisatie jang djusteru sangat diperlukan.

4. Disamping itu setelah perang dunia II, jang menjebab-

kan banjak negeri imperialis kehilangan tanah djadjahannja, ternjata tampak tambah tegas lagi usaha negeri<sup>2</sup> imperialis untuk melaksanakan neo-kolonialisme dalam bentuk :

a. Menekan rendah harga bahan<sup>2</sup> mentah jang harus di-export oleh negeri<sup>2</sup> jang baru merdeka dan sedang berkembang.

b. Menarik naik harga barang<sup>2</sup> mesin dan hasil industri jang harus di-import oleh negeri<sup>2</sup> jang baru merdeka dan sedang berkembang.

Akibat dari politik ini jalah negeri<sup>2</sup> jang sedang berkembang selalu kekurangan uang asing, kekurangan deviezen untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan aspiraties nasionalnja. Malahan untuk mempertahankan tingkat hidup seperti djaman pendjadjahan sadja sulit tanpa „bantuan“ dari negeri<sup>2</sup> asing.

Walaupun politik itu achir<sup>2</sup>nja djuga mempersulit perkembangan industri negeri jang telah maju industrinja, karena politik itu berakibat mempersempit pasar bagi hasil<sup>2</sup> industrinja dan kesulitan itu tjoba diatasi dengan memberi „bantuan<sup>2</sup>“ kredit, tetapi segala „bantuan<sup>2</sup>“ itu djuga tetap mengandung unsur pelaksanaan politik neo-kolonialisme, karena menuntut adanja aturan<sup>2</sup> dari negeri<sup>2</sup> jang sedang berkembang untuk mengadakan djaminan<sup>2</sup> jang menarik penanaman modal asing, djaminan hak transfer, djaminan tidak dinasionalisasi dll-nja lagi.

Menurut statistik Bank Dunia selama tahun 1956-1961 hutang negara<sup>2</sup> jang sedang berkembang pada Bank Dunia telah meningkat dua kali lipat. Walaupun demikian hasil exportnja hanja bertambah 15%. Keadaan ini antara lain oleh Marcus Wallenberg, seorang Bankier Swedia, didjadi-kan alasan untuk mendesakkan pada negeri<sup>2</sup> jang sedang berkembang untuk membuka pintunja lebar<sup>2</sup> buat penanaman modal asing dengan djaminan<sup>2</sup> lajak, jaitu seperti diberitakan oleh „Antara“ baru<sup>2</sup> ini.

Indonesia tentu sadja tidak bebas dari pengaruh perkembangan politik ekonomi internasional, jang dikuasai oleh negeri<sup>2</sup> imperialis itu, apalagi hubungan dagang tradisional warisan djaman pendjadjahan masih membikin Indonesia

tergantung pada perkembangan harga apa jang dikenal sebagai „pasar internasional” dengan pusat<sup>2</sup> London, New York, Amsterdam dan Hamburg. Perjuangan mentjapai harga jang lajak bagi bahan<sup>2</sup> mentah jang di-export belum berhasil. Malahan harga „pasar internasional” bagi banjak matjam bahan mentah jang di-export oleh Indonesia djatuh, karena Amerika Serikat dan Inggeris sering melepaskan timbunan<sup>2</sup> bahan<sup>2</sup> strategisnja dengan akibat sangat mempersulit neratja perdagangan Indonesia dan kekurangan akan uang asing untuk dapat memenuhi kebutuhan<sup>2</sup> jang masih mesti di-import selalu menekan pelaksanaan aspiraties nasional untuk mempertjepat pembangunan.

5. Peralihan penghidupan ekonomi dari negeri<sup>2</sup> A-A sesuai dengan aspiratie nasionalnja memang tidak hanja merupakan masalah pembangunan industri, tidak terbatas pada masalah industrialisatie. Hal ini disebabkan, karena Rakjat terbanjak hidup di-desa<sup>2</sup> jang besar djumlahnja dalam keadaan jang sangat primitif sekali. Pun usaha<sup>2</sup> dibidang pertanian masih sangat primitif. Oleh karenanja pelaksanaan pembangunan di-negeri<sup>2</sup> A-A harus ditudjukan untuk mentjapai keseimbangan antara kemadjuan<sup>2</sup> industri di-kota<sup>2</sup> dan perkembangan masjarakat desa. Apabila tidak ada keseimbangan akan timbul kesulitan<sup>2</sup> baru, karena menghebatnja perbedaan antara penghidupan di-kota<sup>2</sup> besar dan di-desa<sup>2</sup> ketjil, jang dapat merugikan usaha memenuhi kebutuhan barang<sup>2</sup> hasil pertanian.

Setjara ringkas dapat dikemukakan, bahwa masalah<sup>2</sup> pokok jang dihadapi dibidang ekonomi adalah antara lain :

a. Membangun ekonomi desa dengan modernisatie pertanian, sehingga daja-produksi kaum tani, jang merupakan djumlah Rakjat terbesar, dapat dibebaskan dari segala matjam belunggu jang masih terasa mengekangnja, dimulai dengan landreform dan ketentuan mengerdjakan tanah setjara lebih menguntungkan kaum penggarap tanah. Dengan membebaskan daja-produksi kaum tani, jang merupakan djumlah Rakjat terbesar, kita akan dapat mempertinggi daja-beli Rakjat terbanjak itu untuk mendorong kemadjuan<sup>2</sup> perkembangan industri setjara lebih tjepat lagi.

b. Mengusahakan tertjapainja „balanced economy” sebagai gantinya ekonomi kolonial, sesuai dengan kondisi<sup>2</sup> di negeri kita sendiri dengan tudjuan mempertjepat hapusnja sifat tergantung dari „bantuan<sup>2</sup>” atau dari „import” modal asing atau „kredit<sup>2</sup>” luar negeri, jang dapat mendjerumuskan kita ke ekonomi neo-kolonial. Dalam „balanced economy” ini kemadjuan ekonomi desa dan ekonomi kota diusahakan ada keseimbangan.

c. Mengembangkan industri dan mengexploitasi setjara lebih intensif sumber<sup>2</sup> kekajaan alam, jang dapat mengurangi import dan mempertinggi penghasila deviezen untuk mempertinggi kemampuan kita melaksanakan aspiratie nasional dibidang pembangunan menudju kearah tertjapainja „self-sustaining economy” sebagai landasan untuk membangun masjarakat adil dan makmur, jang bersih dari exploitation de l'homme par l'homme.

Demikianlah setjara ringkas persoalan<sup>2</sup>, jang menjimpul-kan djuga kelemahan<sup>2</sup>, jang kita harus hadapi dalam melaksanakan peralihan ekonomi kolonial kita ke ekonomi nasional jang bebas, jang harus berkembang mewudjudkan masjarakat sosialis.

Pelaksanaan peralihan dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional jang bebas di Indonesia pun dipengaruhi oleh djaman penjelewengan politik, jang mendorong didekritkannja kembali UUD 1945.

Kita lihat bahwa didjaman penjelewengan telah terdjadi hal<sup>2</sup> antara lain sebagai berikut :

1. Kita tidak mendahulukan usaha membebaskan kaum tani kita, Rakjat terbanjak, daripada belunggu<sup>2</sup>nja, jang terasa mengekang daja-produksinja, tetapi kita menjaksikan perlombaan dikalangan lapisan atas jang sangat tipis untuk memupuk modal nasional. Akibatnja djumlah importir meningkat keras, karena perdagangan import jang „empuk” dan membikin orang tjepat kaja. Kebutuhan deviezen untuk import terus meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan deviezen ini dilaksanakan export-drive. Untuk keperluan ini, karena harga diluar negeri tetap lemah dan diperlemah, ongkos produksi didalam negeri ditekan rendah jang tidak me-

mungkinkan berkembang daya-produksi Rakyat terbanjak kita. Kita pernah melihat akibatnya yang tidak enak, yaitu disamping kita harus mempertinggi import beras, walaupun tanah kita terkenal subur, kita pun pernah mesti import garam, walaupun laut kita luas dan air laut kita sama asinnya daripada air laut lain.

2. Kita tidak melaksanakan pengerahan funds & forces yang tersedia didalam negeri sampai tingkat maximal, malah membatasi kemungkinan pengerahan funds & forces dengan mempraktekkan diskriminasi rasial dengan politik yang dikenal sebagai main asli-aslian, yang dinjatakan salah oleh amanat Presiden Soekarno pada Kongres Baperki. Djadi modal domestik dan milik warga-negara yang dinjatakan „bukan asli” dibiarkan menganggur, hingga mendjadi „liar”, dalam arti dipaksa bergerak dilapangan perdagangan spekulasi.

3. Kita pernah berusaha melambai-lambai masuk modal asing dengan mengemukakan djaminan<sup>2</sup>, yang pelaksanaannya mendjerumuskan kita ke neo-kolonialisme dan berusaha memperoleh kredit<sup>2</sup>, yang mentjiptakan lapisan tipis orang<sup>2</sup>, yang mewah hidupnya tergantung pada berkembangnya kepentingan negeri<sup>2</sup> peng-export modal asing itu.

4. Perkembangan neratja perdagangan karena akibat harga bahan<sup>2</sup> mentah yang kita export terus menurun adalah buruk. Meningkatkan volume export tidak mendjamin penghasilan diviezen lebih besar. Sedang harga barang<sup>2</sup> yang diimport terus meningkat, sehingga volume import menipis, walaupun deviezen yang disediakan meningkat. Akibatnya kita pernah mengalami tindakan<sup>2</sup> untuk menjehatkan keadaan keuangan, yang dinamakan „sanering”, tetapi keuangan kita tidak mendjadi sehat oleh karenanya dan nilai tukar rupiah kita terus djatuh.

5. Social control sebagai sjarat pelaksanaan demokrasi dan untuk mengembangkan social support bagi tindakan<sup>2</sup> pemerintah sangat lemah, karena anggaran belandja negara tidak dapat ditentukan sebelum masa berlakunya dan praktis semua tindakan dibidang keuangan dan ekonomi diatur dengan undang<sup>2</sup> darurat atau peraturan pemerintah sadja.

Rakyat mesti menghadapi kebidjaksanaan pemerintah dibidang keuangan dan ekonomi sebagai „surprises” jang tidak enak.

Seperti diketahui kita telah berusaha mengachiri djaman penjelewengan itu dengan dekrit Presiden 5 Djuli 1959, jaitu dengan kembali ke UUD 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1959 diumumkannja amanat „Menemukan Kembali Revolusi Kita”, jang sekarang dikenal sebagai Manipol dan menjadi garis<sup>2</sup> besar haluan negara.

Tetapi koreksi atas segala penjelewengan<sup>2</sup> jang telah terjadi belasan tahun itu tentu makan waktu. Manipol dengan tepat mewadajibkan pelaksanaan Landreform dan memperbaiki kedudukan tani penggarap tanah dengan peraturan Bagi-Hasil. Tetapi pelaksanaannja ternyata tidak selantjar jang diharapkan oleh Manipol.

Manipol dan semua Pedoman Pelaksanaannja mewadajibkan ikut-sertanja Rakyat, buruh dan tani untuk mengembangkan produksi dan memperlantjar distribusi, jang berarti melaksanakan „social control” untuk mentjiptakan „social support”, tetapi dalam amanat Tahun Kemenangan ditegaskan, bahwa pelaksanaannja ketjantol pada masih berdjangkitnja „komnisto-phobi, Rakyat-phobi, buruh-phobi, tani-phobi”, jang masih kita mesti bantras.

Sementara koreksi<sup>2</sup> atas penjelewengan itu belum memberi hasil njata, kita mesti menjelesaikan berbagai kelemahan jang terasa njata dalam management perusahaan<sup>2</sup> negara. Usaha mendudukan perusahaan<sup>2</sup> negara pada „commanding position” jang dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional bebas sebagai landasan pembangunan masjarakat sosialis, belum mentjapai hasil. Oleh beberapa orang menteri sendiri disinjalin adanja penjelewengan dan oleh umum disinjalin adanja mismanagement jang menimbulkan kapitalisme birokrasi dan korupsi. Mismanagement ini menimbulkan kesulitan<sup>2</sup>, jang perlu segera diatasi untuk mentjegah perkembangan lebih buruk lagi.

Banjak laporan masuk tentang kegandjilan<sup>2</sup> dibidang produksi kopra. Didaerah kopra, Rakyat kurang bernapsu untuk membikin kopra, jang perdagangannja diurus oleh perusaha-

an<sup>2</sup> negara. Mendjual kelapa mentah lebih menguntungkan daripada mendjual kopra. Lain laporan lagi menuturkan ada banjak kopra tertimbun, tetapi tidak bisa diangkut lantjar

Didaerah lain diterima laporan, bahwa didaerah djeruk di Sumatera Selatan djeruk tidak ada harganja, hingga petani merasa tidak perlu memetik djeruk, sedang harga kebutuhan hidup terus meningkat. Kelantjaran pengangkutan terganggu oleh kesulitan spare-parts.

Dalam keadaan<sup>2</sup> demikian itu, kita menghadapi intensifikasi pemulihan keamanan dan Trikora, jang seperti dijelaskan oleh Presiden dalam amanat „Tahun Kemenangan” menjebabkan penggunaan hampir 75% dari kegiatan nasional kita.

Sekarang keamanan telah pulih dan pelaksanaan Trikora mentjapai tingkat penyelesaian, jang dapat mengurangi anggaran belandja dalam djumlah jang tidak ketjil, sehingga harapan baru timbul, bahwa kita akan dapat menggarap dan mengatasi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi jang dihadapi dalam waktu jang tidak terlalu lama memang beralasan.

Baperki sebagai organisasi massa dan menjediakan diri sebagai salah satu alat-revolusi sebagai anggota Front Nasional tentu sadja wadajib menjiapkan diri untuk ikut aktif menanggulangi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi, apalagi kesulitan<sup>2</sup> ekonomi itu wadajib kita atasi untuk melapangan proses kearah realisasi tjita<sup>2</sup> dan tudjuan Baperki sendiri, jaitu kearah terwujudnja masjarakat sosialis.

Oleh karenanja dalam rangka melaksanakan pasal 2 dari program Baperki, jang masih terasa perlu di-intensifkan pelaksanaannja, terasa perlu Baperki ikut berusaha untuk :

1. Mentjapai pelaksanaan „social control” guna mentjapai adanja „social support” setjara maximal, antara lain dengan memperdjuangkan adanja Anggaran Belandja Negara, jang ditentukan sebelum masa berlakunja, adanja kebiasaan, bahwa segala matjam pungutan dan tindakan<sup>2</sup> jang berakibat mengubah nilai tukar mata uang kita, diatur dengan undang<sup>2</sup>, djadi sebagai hasil permusjawaratan dengan di-ikut-sertakannya Rakjat, disamping melaksanakan setjara sungguh<sup>2</sup> di-ikut-sertakannya Rakjat dibidang usaha mempertinggi produksi

dan memperlantjar distribusi, seperti ditugaskan oleh amanat „Tahun Kemenangan”.

Mengikut-sertakan Rakjat tentu tidak bisa diartikan lain daripada Rakjat ikut-serta menentukan kebidjaksanaan pemerintah, djuga dibidang keuangan dan perekonomian, jang biasanja ditjerminkan oleh Anggaran Belandja Negara. Rakjat jang di-ikut-sertakan menentukan kebidjaksanaan pemerintah, tentu insjaf dan sadar akan perlunja mendukung, memberikan „social support”, jang mendjamin berhasilnja pelaksanaan kebidjaksanaan pemerintah itu.

Kenjataan, bahwa pelaksanaan banjak UU darurat tidak selantjar sebagaimana mestinja, mestinja sudah tjukup mejakinkan kita, bahwa tanpa ikut-sertanja Rakjat dalam menentukan, sukar diharap dukungan, social support, setjara maximal.

Dalam rangka mentjapai pelaksanaan „social control” jang efektif untuk mendjamin adanja „social support” maximal, tentu sadja patut disambut dengan gembira sekali putusan Presiden Soekarno untuk mentjabut keadaan SOB (darurat perang) sebelum bulan Mei 1963. Pelaksanaan „social control” jang efektif dipertjaja akan menjempurnakan pelaksanaan demokrasi terpimpin.

Disamping itu adanja „social control” jang efektif pun pasti mempengaruhi baik usaha mengachiri mismanagement pada Perusahaan<sup>2</sup> Negara, jang menjebabkan timbulnja kapitalisme birokrat dan korupsi.

2. Mentjapai penjelesaian rupa<sup>2</sup> kontradiksi jang njata ada dalam masjarakat kita untuk mendjamin berhasilnja pengerahan funds & forces sampai pada tingkat paling maximal.

Dalam rangka melaksanakan pengerahan funds & forces progressif seperti jang ditugaskan oleh Manipol, terasa bahwa kita melaksanakannja setjara sempit. Dalam arti perhatian kita ditudjukan terbatas pada usaha mengerahkan apa jang dinamakan „idle money” atau „hot-money”, jaitu dengan mendjual obligasi negara, obligasi Bank Negara Indonesia dan mengadakan musjawarah nasional.

Terasa kurang disadari, bahwa pengerahan funds & forces dalam arti jang sempit itu tidak mungkin memberi hasil be-

sar dalam arti jang diharapkan oleh Manipol.

Disamping itu kita pun harus menghadapi kenyataan, bahwa selama kita belum berhasil mengendalikan inflasi, sehingga nilai tukar rupiah mendjadi stabil, pemilik „idle money” atau „hot money”, jang pada umumnja bukanlah filantropen, tentu tetap mentjari lapangan usaha jang dianggap lebih tepat untuk menjelamatkan nilai tukar modalnja. Usaha<sup>2</sup> ini memang bisa mengatjaukan peredaran barang, jang dapat mempengaruhi djelek usaha mengendalikan inflasi.

Selandjutnja kita menghadapi djuga kenyataan, bahwa nilai-tukar dari hasil<sup>2</sup> pertanian Rakjat didalam negeri perlu diatur, hingga membangkitkan kegairahan berproduksi. Disamping itu perlu kita selesaikan keseimbangan harga barang<sup>2</sup> kebutuhan hidup dengan upah buruh dengan gadji pegawai negeri bagian atas dan rendah untuk mentjegah timbulnja birokrasi setjara extra dengan maksud memperoleh penghasilan tambahan, jang seringkali meluntjur ke kapitalisme birokrasi.

Paling achir kita melihat djuga, bahwa alat-negara kita belum seluruhnja bebas dari rasialisme, jang djuga menimbulkan bottlenecks dalam pelaksanaan pengerahan funds & forces, jaitu seperti ditjanangkan oleh Ketua Partindo, A.M. Hanafi. Sebagai bukti masih berdjangkitnja rasialisme pada alat-negara, dapat dikemukakan adanja surat edaran pemimpin alat-negara disatu kota di Djawa Tengah, jang menentukan pembagian bemo terbatas pada mereka jang dinamakan „asli” dan pada pengendara betja.

Dalam rangka usaha menghapuskan betja, sebagai alat exploitation de l'homme par l'homme jang memalukan, memang perlu sekali para tukang betja disalurkan kepekerdjaan lain. Apabila mereka dapat memperoleh pekerdjaan lain, dapat dipertjaja mereka tentu tidak bersedia mendjadi tukang betja. Dalam rangka usaha ini Baperki sangat setudju, apabila priorita membeli bemo diberikan pada para tukang betja Tetapi dalam pelaksanaannja hendaknja tidak diadakan perbedaan perlakuan berdasarkan perbedaan keturunan antara para tukang betja jang sesungguhnya. Hendaknja diperdju-

angka adanja koreksi jang bidjaksana, sehingga kebidjaksanaan untuk melindungi mereka jang ekonomis lemah, kebidjaksanaan untuk memperbaiki nasib golongan warga-negara Indonesia jang berada dilapisan terendah, bebas dari rasialisme. Nasionalisme Pantja Sila adalah nasionalisme anti-rasialisme. Peristiwa itu pun memperbesar kejakinan, bahwa selama masjarakat masih belum bersih daripada napsu penindasan manusia oleh manusia, rasialisme belum dapat dihapuskan sama sekali. Djadi memperkokoh kejakinan kita akan perlunja mempertjepat tertjapainja masjarakat sosialis jang bersih dari penindasan manusia oleh manusia!

3. Menjempurnakan kerdja-sama dengan organisasi<sup>2</sup> massa buruh dan tani dalam rangka usaha mengembangkan gerakan koperasi type Usdek, koperasi konsumsi, koperasi produksi pertanian, koperasi keradjinan tangan dan koperasi kredit. Sengadja digunakan istilah koperasi type Usdek, karena jang kita butuhkan bukanlah koperasi asal koperasi, jang bisa merupakan „koperasi” dalam nama, tetapi sesungguhnya adalah usaha<sup>2</sup> kapitalis<sup>2</sup> besar, bukan usaha<sup>2</sup> pekerdja, jang dibutuhkan adalah koperasi jang mendjadi alat memperlantjar proses peralihan menudju kemasjarakat sosialis.

Dalam hubungan ini patut diperhatikan angka<sup>2</sup> sebagai berikut seperti jang disiarkan oleh „Antara”, jaitu :

Sekarang kurang lebih di 80% desa dan kampung sudah terbentuk koperasi konsumsi dan lebih kurang antara 50-60% Rakjat dewasa sudah bernaung dibawah pandji koperasi setjara formil.

Djumlah koperasi keradjinan (terutama dibidang batik) hanja 3% dari seluruh djumlah koperasi, tetapi djumlah modalnja meliputi 43% dari seluruh modal koperasi jang ada. Dengan begitu tergambar lemahnja keadaan permodalan 97% koperasi lainnja, jang meliputi konsumsi, kredit dan produksi pertanian.

Dengan memperhatikan angka<sup>2</sup> itu sebagai kenjataan, disamping perlunja mengembangkan kegiatan dibidang koperasi produksi dan kredit dengan kerdja-sama lebih baik dengan organisasi<sup>2</sup> massa tani dan buruh di-desa<sup>2</sup> dan kota<sup>2</sup>, maka terbuka kemungkinan mengusahakan penyelesaian<sup>2</sup>

kontradiksi jang kurang perlu antara kota dan desa dengan koperasi produksi pertanian dan koperasi kredit jang be-  
kedja dengan baik dalam rangka usaha melaksanakan penge-  
rahan funds & forces sampai pada tingkat paling maximal.

**Usaha<sup>2</sup> Baperki dibidang perguruan tinggi  
dan pendidikan harus dikonsolidasi.**

Pelaksanaan pasal ketiga dari program Baperki, jaitu mengkonsolidasi usaha<sup>2</sup> dibidang perguruan tinggi dan pendidikan dengan meletakkan titik-berat pada pendidikan ke-  
djuruan, jang dapat menguntungkan proses peralihan menu-  
dju kemasjariat sosialis, ternyata perlu sekali dilaksanakan  
setjara lebih sempurna, lebih intensif.

Dari laporan tentang perkembangan perguruan tinggi kita dan laporan tentang perkembangan usaha<sup>2</sup> Baperki dibi-  
dang pendidikan dasar tergambarlah, bahwa perkembang-  
an usaha<sup>2</sup> Baperki dibidang perguruan tinggi dan dibidang  
pendidikan dasar telah tumbuh djauh lebih pesat daripada  
kita berani harapkan semula. Oleh karenanja usaha<sup>2</sup> meng-  
konsolidasi perlu dilaksanakan setjara lebih intensif lagi dari-  
pada jang sudah<sup>2</sup>.

Kesimpulan ini pun mendjadi sebab kita perlu dalam waktu  
singkat memperluas untuk menjempurnakan pengurus Jajasan  
Pendidikan & Kebudajaan Pusat Baperki. Dalam susunan  
pengurus jang diperluas itu dipikirkan untuk memperkuat  
pengurus Jajasan dengan :

a. Seorang petugas khusus jang memperhatikan, mengu-  
rus dan menjelenggarakan usaha<sup>2</sup> pelaksanaan konsolidasi  
usaha<sup>2</sup> kita dibidang perguruan tinggi.

b. Seorang petugas khusus jang memperhatikan, mengu-  
rus dan menjelenggarakan usaha<sup>2</sup> pelaksanaan konsolidasi  
usaha<sup>2</sup> dibidang pendidikan dasar.

c. Seorang petugas khusus untuk mengembangkan pen-  
didikan kedjuruan dan kursus<sup>2</sup> kedjuruan.

d. Seorang petugas khusus jang memperhatikan, mengu-  
rus dan menjelenggarakan usaha<sup>2</sup> pelaksanaan konsolidasi  
dibidang kebudajaan, pertundjukan, pameran dan penerbitan.

Usaha<sup>2</sup> kita dibidang perguruan tinggi, pendidikan dan kebudayaan sebagai diketahui adalah usaha<sup>2</sup> untuk memperlantjar terlaksananya tjita<sup>2</sup> Baperki, djadi memperlantjar terwujudnja masyarakat sosialis, masyarakat adil dan makmur, jang mengachiri exploitation de l'homme par l'homme.

Dalam hubungan ini patut sekali diperhatikan, bahwa dalam usaha mengkonsolidasi usaha<sup>2</sup> kita dibidang perguruan tinggi perlu lebih tegas ditudjukan untuk mendidik warga-negara<sup>2</sup> jang berdjiwa Manipol-Usdek-Resopim, jang dibekali dengan technical skill tingkat sardjana, sehingga lebih sanggup membangun masyarakat sosialis.

Usaha<sup>2</sup> kita untuk mengkonsolidasi hasil usaha<sup>2</sup> kita dibidang perguruan tinggi memang sangat dipengaruhi oleh perkembangan proses menudju kemasjariat sosialis itu sendiri. Walaupun demikian tudjuan usaha kita mengkonsolidasinja ialah untuk dapat mempertjepat proses peralihan menudju kemasjariat adil dan makmur. Hal ini akan kita sadari lebih tegas lagi, apabila kita perhatikan kenjataan<sup>2</sup> sebagai berikut :

1. Dalam usaha kita untuk memenuhi segala aspiraties nasional kita, jang mentjetuskan proklamasi kemerdekaan nasional kita, kita tidak bisa tidak kebentur pada masalah perluasan pendidikan dari tingkat rendah, hingga tingkat tinggi, pendidikan umum, pendidikan kedjuruan, terutama kedjuruan tehnik. Sekalipun dalam tempo 20 tahun djumlah murid/mahasiswa sudah berhasil dilipat-gandakan mendjadi tiga kali lipat, jaitu dari 2.415.253 untuk tahun peladjaran 1939/1940 dan dalam tahun peladjaran 1958/1959 meningkat mendjadi 7.948.076, dalam djumlah ini termasuk 32.344 mahasiswa, tetapi untuk menjusul keterbelakangan kita dibanding dengan keadaan di-negeri<sup>2</sup> jang madju, kita masih perlu kerdja keras dan melaksanakan pengerahan funds & forces setjara lebih intensif.

2. Perkembangan kemadjuan ilmu pengetahuan sesungguhnya tergantung pada perkembangan kemadjuan masjariat umumnja dan chususnja perkembangan kemadjuan industri. Sekalipun benar, bahwa penelitian (research) ilmu pengetahuan murni dapat dilakukan setjara tidak tergantung

daripada industri, tetapi perkembangan<sup>2</sup> penemuan dan kegunaan suatu penemuan ilmiah bagi kemajuan penghidupan umat manusia hanya dapat dilaksanakan dalam suatu masyarakat, dimana industrinja sudah berkembang maju. Sebaliknya kemajuan industri sekarang ini sangat tergantung pada usaha<sup>2</sup> penelitian (research) dibidang ilmu pengetahuan yang dilakukan setjara tekun dan setjara terus-menerus. Tingkat technology, ilmu membikin barang, yang tinggi dan baik hanya dapat ditjiptakan dalam satu masyarakat yang sudah mengenal industri yang maju.

Dengan memperhatikan kenyataan ini, bahwa pekerdjaan ilmiah tidak dapat maju dalam satu kekosongan, jaitu tanpa ada perkembangan industri yang maju disekitarnja dan kemajuan industri ini tergantung pula pada adanja ilmu technology yang tinggi, maka mendjadi djelas djuga, bahwa usaha<sup>2</sup> mengkonsolidasi hasil usaha kita dibidang perguruan tinggi sangat tergantung pada usaha<sup>2</sup> pelaksanaan pasal dua program kita, jaitu tergantung pada berhasilnja usaha mengembangkan industrialisasi disamping usaha membangun masyarakat desa dengan modernisasi pertanian untuk menjapai adanja keseimbangan.

Selandjutnja dalam usaha melaksanakan pasal 2 program perdjuaan Baperki, ternjata terasa perlu dilaksanakan perobahan pandangan<sup>2</sup> kolot dari masyarakat dan usaha mengubah itu harus dimulai pada waktu kanak<sup>2</sup>. Masyarakat kita sehingga dewasa ini kurang menaruh penghargaan pada pendidikan kedjuruan, karena buktinja orang<sup>2</sup> yang beridjazah kedjuruan, bahkan yang beridjazah ingenieur sekalipun sebagian terbesar hidup dari dagang, bukan dari pekerdjaan sebagai produsen. Belum tjukup disadari, bahwa masyarakat, yang sebagian besar terdiri dari pedagang, tukang warung, spekulan dan tukang tjatut, tidak mungkin mewudjudkan masyarakat sosialis, yang bersih dari penindasan manusia oleh manusia, yang mendjamin penghidupan bebas dari rasa takut akan dianak-tirikan, bebas dari prasangka keturunan dan bebas dari rasa rakut akan menderita kemelaratan. Karena dalam masyarakat demikian itu timbul perlombaan untuk me-

nimbun keuntungan sebanjak mungkin, jang menjebakkan exploitation de l'homme par l'homme.

Ini pun jang menjebakkan kita menentukan untuk melaksanakan pendidikan dasar berdasarkan prinsip Pantja Tjinta :

1. Tjinta Rakjat dan Tanah Air
2. Tjinta perikemanusiaan dan perdamaian
3. Tjinta ilmu dan kebudajaan
4. Tjinta kerdja
5. Tjinta orang-tua (ibu-bapak).

Sekalipun Pantja Tjinta ini sudah kita setudjui, tetapi hingga sekarang belum tegas dirumuskan dalam mata<sup>2</sup> peladjaran pada rumah<sup>2</sup> sekolah kita, sehingga betul<sup>2</sup> prinsip Pantja Tjinta meresap dan mendjadi darah-daging anak<sup>2</sup> lulusan sekolah<sup>2</sup> kita. Memang, sebagai minimum atau sebagai dasar kita harus melaksanakan daftar peladjaran negeri untuk mempermudah anak<sup>2</sup> dalam sekolahan Baperki ikut udjian<sup>2</sup> negeri. Tetapi kechususan sekolah<sup>2</sup> Baperki harus tergambar pada usaha menanamkan prinsip Pantja Tjinta pada anak<sup>2</sup> itu, disamping menanamkan djiwa Patriot Paripurna.

Untuk memikirkan pelaksanaan pandangan tersebut itu, maka pengurus Jajasan Pendidikan & Kebudajaan diperkuat seorang tenaga achli pendidik, jaitu Drs. Suprijo. Pelaksanaannja tentu sangat mengharap bantuan<sup>2</sup> para pengurus Tjabang<sup>2</sup>, terutama pengurus Tjabang Jajasan jang mengusahakan sekolah<sup>2</sup> Baperki.

Dalam hubungan ini patut disambut dengan gembira, bahwa beberapa Tjabang telah mulai berusaha untuk melaksanakan andjuran membangun sekolah<sup>2</sup> kedjuruan. Dipertjaja, bahwa usaha<sup>2</sup> itu tentu akan memenuhi kebutuhan jang terasa ada, disamping akan mendorong kemadjuan proses peralihan menudju kemasjarakat adil dan makmur.

Paling achir dapat dikemukakan djuga, bahwa perkembangan usaha<sup>2</sup> Baperki dibidang pendidikan ini ternjata menimbulkan kebutuhan akan adanja penerbitan buku<sup>2</sup> tambahan untuk para guru, mahasiswa dan peladjar. Seksi urusan

penerbitan djadi perlu diadakan dan hendaknja dapat bekerdja. Disamping mengurus penerbitan seksi ini hendaknja dapat menjelenggarakan pameran<sup>2</sup>/pertunjukan<sup>2</sup> jang menggambarkan pada masjarakat setjara visuil kemadjuan<sup>2</sup> usaha<sup>2</sup> Baperki, jang dapat membangkitkan kegembiraan masjarakat untuk memberi bantuan, sokongan dan lain<sup>2</sup> bagi kelantjaraan kemadjuan usaha<sup>2</sup> Baperki selandjutnja.

Laksanakanlah „TJORAK” setjara intensif.

Setelah kita menindjau tugas dan usaha jang wadjib dilakukan oleh Baperki dalam rangka pelaksanaan amanat „Tahun Kemenangan” seperti dituturkan diatas itu, maka terasa perlunja untuk menjempurnakan Baperki sebagai organisasi dan tjara bekerdja sebagai organisasi massa.

Menurut Saudara Djawoto, Ketua Umum PWI dalam sebuah sidang DPR, jang dibutuhkan untuk mentjapai tjara kerdja suatu organisasi dengan baik adalah pelaksanaan „Tjorak” setjara intensif. Dengan „Tjorak” itu diartikan :

- TJ** = Tjita-tjita      Tjita<sup>2</sup> Baperki adalah Manipol-Usdek-Resopim dan garis Presiden tentang penyelesaian masalah golongan ketjil.
- O** = Organisasi      Baperki telah berwujud organisasi, sekalipun belum sempurna seperti jang diharapkan.
- R** = Rentjana      Rentjana kerdja atau program kerdja Baperki sudah dirumuskan dan sudah tjukup didjelaskan.
- A** = Aksi massa      Rentjana kerdja Baperki djuga ditudjukan untuk dapat menggalang aksi<sup>2</sup> massa.
- K** = Kontrol      Kontrol atas pelaksanaan rentjana kerdja dalam wujud aksi<sup>2</sup> massa dan kontrol atas perkembangan organisasi belum tjukup disadari dan belum dilaksanakan setjara intensif.

Dalam meneliti pengalaman dan tjara kerdja organisasi kita, kita rasakan, bahwa pelaksanaan kontrol, baik kontrol atas pelaksanaan rentjana kerdja mendjadi aksi<sup>2</sup> massa, maupun kontrol perkembangan organisasi sebagai alat pelaksanaan tjita<sup>2</sup> jang mendjadi tudjuan kita, masih mengalami banjak kekurangan. Rapat<sup>2</sup> anggota dan konperensi<sup>2</sup> daerah belum diselenggarakan setjara intensif disemua Tjabang dan Dewan Daerah.

Mengingat, bahwa untuk mentjapai adanja kesatuan aksi, kita perlu memperkokoh adanja kesatuan tjita<sup>2</sup>, jang harus ditjapai dengan permusjawaratan<sup>2</sup>, maka terasalah, bahwa adanja rapat<sup>2</sup> umum tjabang, atau pertemuan<sup>2</sup> anggota pada unit (kesatuan) organisasi jang paling ketjil seperti ranting, ada sajarat mutlak. Adanja pertemuan<sup>2</sup> atau rapat<sup>2</sup> anggota, dimana pengurus memberi pertanggungan djawab akan mentjiptakan kontrol massa jang konstruktif dan akan dapat memperhebat daja-djuang massa kita dan mempertinggi mutu Baperki sebagai organisasi massa.

Pertimbangan inilah jang menjebabkan usul, supaja setelah konperensi pleno ini seluruh organisasi Baperki melaksanakan „TJORAK” setjara sungguh<sup>2</sup> dan intensif dan dalam konperensi jad akan kita saksikan perkembangan organisasi lebih pesat daripada masa jang lalu.

Terima kasih !

---

## SELESAIKANLAH SEGALA KONTRADIKSI SETJARA TEPAT

**Untuk mendjamin pengerahan funds & forces progressif sampai tingkat paling maximum.**

Konperensi pleno „Baperki” jang berlangsung di Djakarta dari tanggal 10 November hingga dengan 12 November untuk menentukan tugas<sup>2</sup> Baperki dalam perdjuaan melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan” guna memperlantjar terwujudnja masjarakat sosialis, antara lain memutuskan dengan suara bulat beberapa pernyataan sebagai berikut :

1. Konperensi pleno Baperki menjambut dengan gembira ketegasan Presiden Soekarno didalam amanat „Tahun Kemenangan”, jang menjatakan : „..... mengingat, bahwa hingga kini kita masih dapat mempertahankan kehidupan nasional dilapangan ekonomi, meskipun 75% dari kegiatan nasional dilemparkan kepada keamanan dan Irian-Barat, maka saja, dimana sekarang soal keamanan dan Irian-Barat itu boleh dikatakan selesai, Insja Allah merasa sanggup untuk mengatasi bottlenecks dan kesulitan<sup>2</sup> dari persoalan ekonomi dalam waktu pendek jang tidak terlalu pandjang. Sementara itu saja disini menandakan, bahwa untuk lantjar-nja pelaksanaan program ekonomi (antara lain sandang-pangan), maka perlulah benar<sup>2</sup> menjingkirkan beberapa penjakit. Diantara penjakit<sup>2</sup> itu, jang terpokok ialah terlalu parahnja penjakit komunisto-phobi, kiri-phobi, Rakjat-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi, jang masih ngendon didalam hati dan kepala setengah alat<sup>2</sup> negara jang bersangkutan”.

Konperensi Baperki yakin, bahwa kemampuan nasional kita untuk membangun pasti dapat diperbesar setjara njata dengan :

- a. Menertibkan anggaran belandja negara dan memperkeras disiplin anggaran belandja, sehingga dapat lebih ditertibkan setjara efektif lagi penggunaan deviezen dan kekajaan negara dengan tudjuan mengachiri segala bentuk pemboroson dan dapat dilaksanakan ide untuk memperbanyak dan mempertjepat pelaksanaan pembangunan<sup>2</sup> jang bersifat produktif untuk memperlipat-gandakan daja-produksi nasional serta menangguhkan untuk sementara pembangunan<sup>2</sup> jang bersifat konsumtif. Dalam hubungan ini dipertimbangkan untuk melaksanakan sungguh<sup>2</sup> putusan pemerintah untuk menghentikan sama sekali import mobil sedan dan lebih mengutamakan penggunaan deviezen untuk spare-parts alat<sup>2</sup> produksi serta import bahan<sup>2</sup> baku untuk memungkinkan penggunaan alat<sup>2</sup> produksi jang ada dengan capaciteit-penuh. Disamping ini terasa lebih mendesak untuk lebih mengutamakan import alat<sup>2</sup> produksi guna menggali kekajaan<sup>2</sup> alam jang terkandung didalam bumi, air dan laut Indonesia. Air laut Indonesia sama halnja dengan air laut negeri lain mengandung bahan<sup>2</sup> kimia untuk membikin caustic soda, carporiet, asem semut dll-nja, jang sekarang masih mesti di-import dan kematjetan importnja membikin matjet produksi berbagai barang kebutuhan penting.
- b. Mengikut-sertakan Rakjat setjara lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebidjaksanaan di bidang ekonomi dan keuangan dengan djalan menjempurnakan pelaksanaan „social control” untuk mendjamin adanja „social support”. Untuk keperluan ini usaha menjempurnakan hak<sup>2</sup> demokrasi dalam rangka menjempurnakan demokrasi terpimpin terasa perlu mendapat perhatian lebih besar lagi. Tjara bekerdja DPR, DPR-D dan Front Nasional sebagai alat dan alat membantu untuk melaksanakan „social control”, serta kemerdekaan pers perlu diperkembangkan untuk membikin efektif demokrasi terpimpin dengan ikut-sertanja Rakjat guna mengachiri setjara sistematis mismanagement pada Perusahaan<sup>2</sup> Negara, seperti disinjalir oleh berbagai menteri sendiri, untuk mengachiri adanja kapitalisme birokrasi dan ko-

rupsi, jang merugikan usaha menempatkan Perusahaan<sup>2</sup> Negara dalam kedudukan memimpin (commanding position) seperti dikehendaki oleh Manipol.

- c. Memperlantjar pelaksanaan usaha<sup>2</sup> membebaskan Rakjat petani, terutama kaum tani penggarap tanah, daripada segala belunggu jang masih terasa mengekang meningkatnja daja-produksinja, a.l. dengan mempertjepat pelaksanaan setjara sungguh<sup>2</sup> UU Bagi-Hasil dan Landreform dengan tudjuan mempertinggi daja-produksi pertanian setjara menguntungkan usaha mempertinggi daja-beli Rakjat terbanjak.

2. Dalam rangka usaha membantu pelaksanaan pengerahan funds & forces progressif sampai pada tingkat maximum, Konperensi Baperki berpendapat akan perlunja ada usaha<sup>2</sup> njata untuk :

- a. Menjelesaikan segala matjam kontradiksi jang njata ada dalam masjarakat setjara tepat dan tidak membatasi pengertian pengerahan funds & forces jang harus dikerahkan hanja pada „idle money” atau „hot money”. Penjelesaian kontradiksis dalam masjarakat setjara tepat akan memperbesar djumlah funds & forces progressif jang dapat dikerahkan untuk melaksanakan Manipol setjara lebih sungguh<sup>2</sup>. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa kegandjilan<sup>2</sup> jang ternjata ada, umpamanja ongkos pemeliharaan kera dalam Kebon Binatang di Semarang ditentukan Rp. 16,— sehari padahal upah buruh harian DPU kotapradja Semarang hanja Rp. 9,— sehari; ketentuan harga kopra ditentukan sedemikian rupa, sehingga praktis hampir meniadakan napsu membikin kopra dan membikin banjak alat produksi minjak kelapa mendjadi menganggur; banjak sedan baru membandjir masuk, sedangkan banjak alat pengangkutan umum keadaannja menjedihkan dan menimbulkan kematjetan karena kekurangan spare-parts; dll-nja lagi perlu segera diatasi untuk membangkitkan kegairahan berproduksi dan mempertinggi daja-produksi nasional.

- b. Memperluas adanja Musjawarah Nasional bagi para pengusaha mendjadi Musjawarah Nasional antara kekuatan<sup>2</sup> produktif didalam negeri kita, jang meliputi buruh, tani, tjendekiawan, pengusaha nasional dan domestik untuk memperlantjar usaha menjelesaikan rupa<sup>2</sup> kontradiksi didalam masjarakat setjara tepat, jang menguntungkan pelaksanaan pengerahan funds & forces progressif guna memperlipat-gandakan daja-produksi nasional. Musjawarah matjam ini hendaknja diselenggarakan oleh pimpinan Front Nasional Pusat.
- c. Membantras setjara lebih intensif sisa<sup>2</sup> pandangan rasialis, jang merupakan salahsatu bottle-necks dalam usaha mentjapai hasil maximum dalam pengerahan funds & forces. Apalagi terasa ada usaha dari sementara rasialist untuk membelokkan perhatian orang daripada sasaran tombak revolusi Indonesia, jang tegas menudju kemasjarakat sosialis.
-

## PERKOKOHLAH TERUS BARISAN „NEW EMERGING FORCES”

Tjegah berhasilja siasat „old established forces”  
untuk „membeli”/„menjewa” orang<sup>2</sup> Asia  
membunuh orang Asia.

Konperensi Pleno Baperki Pusat, jang dilangsungkan di Djakarta dari tanggal 10 hingga dengan 12 November 1962 untuk merumuskan tugas<sup>2</sup> Baperki dalam rangka melaksanakan amanat „Tahun Kemenangan” untuk mendjamin kelantjaran proses menudju kemasjariat sosialis, antara lain menerima dengan suara bulat putusan<sup>2</sup> sebagai berikut :

1. Konperensi Pleno Baperki dengan gembira menjambut dan mendukung sepenuhnya ketegasan Presiden Soekarno, jang dikemukakan dalam amanatnja pada para pemuda/mahasiswa A-A-A pada peringatan Hari Pahlawan di Tokio. Dalam amanat itu Presiden Soekarno mempertegas, bahwa Indonesia berdiri dalam barisan „New Emerging Froces of the World” (barisan kekuatan<sup>2</sup> baru, jang sedang tumbuh didunia), jang kini sedang berdjuaug membangun dunia baru. Walaupun didunia kita masih berdiri „the old established forces” (kekuatan<sup>2</sup> konservatif), tapi kekuatan<sup>2</sup> „the new emerging forces”-lah jang kini makin mendjadi, mendalam, meluas dan akan menghantjurkan sama sekali kekuatan kolot itu”.

Berdasarkan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden Soekarno itu, Konperensi Pleno mengharap Pemerintah RI segera mengambil tindakan<sup>2</sup> seperlunja guna mentjegah berlangsungja dan terulangnja pelanggaran<sup>2</sup> kasar dan sewenang<sup>2</sup> terhadap kedaulatan nasional negeri<sup>2</sup> „new emerging forces”, jaitu antara lain berupa blokade ekonomi terhadap Kuba, pengintaian<sup>2</sup> dengan pesawat<sup>2</sup> terbang U-2

terhadap Kuba, jang pernah dialami sampai 7 kali oleh RI sendiri dan lain<sup>2</sup>nja lagi oleh kekuatan<sup>2</sup> „old established forces”.

2. Konperensi Baperki menjambut dengan gembira dan dengan suara bulat mendukung ketegasan sikap Pemimpin Besar Revolusi Rakjat Kuba, Fidel Castro, dalam mempertahankan hak kedaulatan Rakjat Kuba untuk menentukan sendiri nasibnja dan sistim masjarakat jang dikehendaki bebas dari tjampur tangan asing.

Dalam rangka memperkokoh the new emerging forces dan melaksanakan ketegasan pernyataan chidmat dalam alinea pertama „Pembukaan UUD 1945” kita sendiri, jang menyatakan: „bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, Konperensi Baperki mengharap pemerintah RI dapat mengambil tindakan<sup>2</sup> seperlunja untuk mendjamin pelaksanaan hak Rakjat Kuba untuk hidup merdeka dan untuk mempertahankan kemerdekaan nasionalnja guna bebas memilih sistim masjarakat dan bentuk pemerintahan jang dikehendakinja sendiri, sesuai dengan Piagam PBB.

3. Dalam rangka memperdjuangkan pelaksanaan kerangka ke-3 revolusi Indonesia menudju kemasjarakat sosialis, Konperensi Baperki dengan tjemas mengikuti perkembangan sengketa tapal batas, warisan djaman usang jang telah lampau, antara pemerintah Republik India dan Republik Rakjat Tiongkok. Apalagi setelah kita memperoleh kenjataan bahwa adanja sengketa tapal-batas, jang meningkat mendjadi clashes bersendjata, ternjata didjadikan alasan oleh old established forces untuk memperhebat pelaksanaan siasatnja untuk mengadu-domba kekuatan<sup>2</sup> new emerging forces, untuk melaksanakan politik orang<sup>2</sup> Asia diberi sendjata untuk membunuh orang<sup>2</sup> Asia sendiri!

Rakjat India jang pernah dengan tegas menentang politik old established forces untuk „menjewa”, atau „membeli” orang<sup>2</sup> Asia guna membunuh orang<sup>2</sup> Asia sendiri tentunja berusaha untuk tidak terdjeblos kedalam siasat old esta-

bished forces, yang menggunakan adanya sengketa tapal-batas untuk mengobrol sendiri<sup>2</sup> alat pembunuh manusia.

Konperensi Pleno Baperki mengharap supaya PJM Presiden Soekarno, yang sekarang masih berada diluar negeri untuk istirahat, mengambil langkah<sup>2</sup> yang dipandang perlu dan berguna untuk membantu mentijptakan iklim baik guna memungkinkan penyelesaian sengketa tapal-batas India-RRT dengan jalan damai setjara memperkokoh kedudukan „the new emerging forces” dalam perjuangan melaksanakan likwidasi imperialisme sesuai dengan semangat A-A. Dalam hubungan ini terasa perlunya memperkokoh desakan pada pemerintah<sup>2</sup> India dan RRT untuk segera menjetudji pertama<sup>2</sup> adanya „cease fire”, menghentikan pertempuran<sup>2</sup>, yang segera harus disusun oleh adanya perundingan untuk menentukan garis stand-fast guna memungkinkan perundingan<sup>2</sup> menyelesaikan sengketa tapal-batas dengan jalan damai.

4. Konperensi Pleno Baperki menjambut dengan gembira dan mendukung ide Presiden Soekarno untuk menjelenggarakan „new emerging forces games” dan mengharap penjenggaraanja dapat dilaksanakan dalam rangka usaha menggalang setiakawan anti-imperialisme yang lebih kokoh dari semua new emerging forces, yang menguntungkan pelaksanaan kerangka ke-3 revolusi Rakjat Indonesia menuju kemasyarakat sosialis.

5. Konperensi Pleno Baperki menjambut dengan gembira berita<sup>2</sup> yang menggambarkan kemajuan persiapan<sup>2</sup> Konperensi<sup>2</sup> Wartawan A-A dan Buruh A-A dengan harapan, bahwa adanya Konperensi Wartawan<sup>2</sup> dan Buruh A-A itu akan menguntungkan perjuangan Rakjat Indonesia untuk mengkonsolidasi kekuatan guna memperhebat setiakawan Rakjat<sup>2</sup> A-A untuk merealisasi tudjuan Revolusi Indonesia sendiri.

Djakarta, 12 November 1962.

Konperensi Pleno Pusat Baperki  
Pimpinan Sidang  
tttd.  
Siauw Giok Tjhan

Ali Sastroamidjojo S.H. :

## NASIONALISME KITA, ANTI KAPITALISME, KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Menteri/Wk Ketua MPR-S Ali Sastroamidjojo, dalam tjeramahnja kepada mahasiswa<sup>2</sup> digedung Universitas „Baperki” didjalan Tangerang, Djakarta, malam Sabtu, setjara populer sekali menguraikan masalah<sup>2</sup> disekitar pertumbuhan perasaan nasionalisme di Eropah Barat dalam perbandingan dengan tumbuhnja nasionalisme dari Rakjat<sup>2</sup> Timur, chususnja Indonesia, jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. penuh dengan kontras<sup>2</sup>.

Tjeramah tersebut didahului dengan uraian populer mengenai tumbuhnja perasaan nasionalisme di Eropah Barat melalui revolusi Perantjis dalam tahun 1789, dimana pada saat itu timbul perlawanan<sup>2</sup> dari kaum bordjuis terhadap kekuasaan feodal jang waktu itu mengandung perspektip kapitalistis.

Situasi demikian menurut Ali Sastroamidjojo S.H. sangat berbeda dengan timbulnja perasaan nasionalisme di Indonesia jang tumbuhnja merupakan reaksi melawan penindasan<sup>2</sup> kaum pendjdjah dari luar dan tekanan<sup>2</sup> kaum feodal didalam negeri, sehingga sifat nasionalisme Indonesia tidak kapitalistis seperti di Eropah Barat, tapi sebaliknya anti-kapitalisme, anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

Dalam uraian selandjutnja, Ali Sastroamidjojo S.H. mendjelaskan masalah<sup>2</sup> disekitar perkembangan sedjarah perjuangan bangsa kita setjara lebih konkrit, jang ditjetuskan dengan tampilnja Bung Karno dalam tahun 1927 untuk menuntut „Indonesia Merdeka Sekarang Djuga” (4 Djuni 1927), dan seperti telah diketahui, kemerdekaan itu di-tjita<sup>2</sup>kan sebagai djembatan emas untuk mentjapai pembentukan masjarakat adil-makmur jang kini lebih dikenal dengan definisi masjarakat sosialis Indonesia.

## Persatuan, sendjata ampuh.

Oleh Ali Sastroamidjojo S.H. dikatakan djuga, bahwa karena pertumbuhan nasionalisme Indonesia itu berhadapan muka dengan politik petjah-belah kaum pendjadjah, maka timbullah keharusan untuk memupuk persatuan militan revolusioner, sehingga bentuk nasionalisme kita itu tidak boleh bersifat sempit serta sovunistis. Hal ini telah terbukti mendjadi sendjata ampuh dalam revolusi kemerdekaan kita sampai tahun 1945.

Dalam menguraikan definisi nasionalisme jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. adalah suatu kesadaran daripada perasaan menganggap se-olah<sup>2</sup> perasaan nasionalisme itu baru ada sesudah ada nasion.

Ali Sastroamidjojo S.H. kemudian mendjelaskan, bahwa oleh karena itu, maka didunia kita ini tidak ada bangsa jang keturunannja harus sama sehingga Ali Sastroamidjojo S.H. berpendapat, bahwa akan berbahajalah djikalau dalam mempersoalkan masalah bangsa (nasion) dipakai masalah keturunan sebagai dasarnja. Hal ini terbukti didjaman Hitler dulu.

## Persatuan sebagai cement nasionalisme.

Hanja kemauan untuk ber-satu-lah jang menurut pendapat Ali Sastroamidjojo S.H. mendjadi „cement” nasionalisme.

Selandjutnja, dalam menguraikan masalah asimilasi pada kesempatan tanja-djawab setelah Ali Sastroamidjojo S.H. mengachiri tjeramahnja selama 2 djam lebih, berkatalah Wk Ketua MPR-S itu, bahwa dalam men-tjita<sup>2</sup>kan lekasnja terlaksana ide asimilasi, harus ditjatat, bahwa hal ini bukan sekedar problim politik, tapi djuga merupakan problim sosial, sehingga terasa perlunja untuk ber-hati<sup>2</sup> dan tidak gegabah.

Didjelaskan djuga bahwa pembitjara tidak dapat membenarkan ide untuk membikin „uniform” nama, karena nasionalisme harus diudji dari perasaan seseorang nasionalis, dan bukan dari namanja. Keterangan ini ditambah dengan pendjelasan, bahwa sebagai bukti akan benarnja pendapat ini

dapat dilihat dalam diri Kartosuwirjo, jang menurut Ali Sastroamidjojo S.H. sekalipun bernama Indonesia, tapi mem-berontak terhadap „Republik Indonesia”. Karena itu, nama bukanlah garansi, kata Ali Sastroamidjojo S.H., jang kemu-dian berkata, bahwa nama jang kita terima sebagai pem-berian orang tua haruslah dihormati.

---

## Statement Pengurus Besar Partindo :

### SEKALI LAGI TENTANG PENERAHAN FUNDS AND FORCES

Sedjak dari Presiden Soekarno mengamanatkan Manifesto Politik, jang sekarang telah dinjatakan sebagai garis<sup>2</sup> besar haluan negara, kita mestinja telah berusaha keras untuk mentjiptakan „iklim baik” untuk dapat mengerahkan seluruh funds and forces progresif sampai pada tingkat paling maximum.

Dalam instruksi Presiden sebagai Komando Panglima Besar Komando Operasi Ekonomi, kita djumpai berbagai ketegasan untuk melaksanakan **penerahan funds and forces** jang dapat mempertinggi daja-produksi nasional, sehingga dapat diperhebat daja-djuang Rakjat dan daja-tempur nasional setjara simultan untuk mendjamin kembalinja Irian Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia sebelum tahun 1962 berachir.

Djustru dalam taraf meningkatnja perdjjuangan Trikora sekarang ini Partindo, merasa perlu mengingatkan kembali kepada Pemerintah dan Rakjat Indonesia umumnja, terutama kepada segenap kaum marhaen, supaja kita tidak sekedjapun lalai agar dalam setiap tindakan politik maupun ekonomi, berpangkal dari penerahan funds and forces, dan karena itu selalu berdjuang untuk melenjapkan segala hal jang merintanginja, djustru dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden sebagai Panglima Besar Komando Operasi Ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas jang diberikan oleh Manipol pada kita semua dan melaksanakan Komando Panglima Besar Komando Operasi Ekonomi itu, ternjata perlu sekali diperhatikan supaja melenjapkan berbagai matjam „bottle

necks", yang selama ini terasa menghambat ditjapainja hasil setjara maximum dalam pengerahan funds and forces progresif dan usaha mempertinggi daja-produksi nasional setjara njata. Lebih pula sekarang ini, setelah arus inflasi terasa meningkat, kita tentunja semua lebih merasakan perlunja ada tindakan<sup>2</sup> lebih positif yang dapat mempertinggi daja-produktivitatip tenaga, modal dan alat produksi yang tersedia didalam negeri, sehingga procentage meningkatnja daja-produktivita itu dapat mengatasi procentage inflasi, supaya inflasi dapat dikendalikan untuk dihapuskan sama sekali.

Beberapa „bottle-necks” yang harus diperhatikan untuk diusahakan lenjapnja antara lain adalah :

1. Berbagai matjam pungutan extra di-daerah<sup>2</sup>, yang tidak berdasarkan Undang<sup>2</sup> yang memperberati beban bagi kaum producent kita. Pungutan<sup>2</sup> ini seperti antaranja terhadap kopra diberbagai daerah, menekan rendah penghasilan yang didapat oleh para producent kopra, petani kelapa, sehingga melenjapkan kegairahan untuk mempertinggi daja-produktivitanja.
2. Berbagai peraturan didaerah, yang praktis menggrowoti peraturan dan politik umum pusat. Umpamanja ketetapan MPRS dengan tegas menentukan, bahwa modal swasta, baik domestik maupun nasional, diberi kesempatan untuk bekerdja dan memperluas aktivitanja dibidang industri ringan, tingkat sedang yang besar. Tetapi ada daerah yang mengadakan ketentuan<sup>2</sup>, atau membiarkan berlaku terus ketentuan<sup>2</sup> warisan djaman „penjelewengan”, jaitu djaman sebelum ada Manipol, yang tidak membangkitkan kegairahan bekerdja modal swasta itu, seperti warisan daripada peraturan Menteri Perekonomian Iskaq S.H. dahulu yang menentukan sjarat komposisi modal, apabila dilaksanakan dalam suasana tertekan, pasti tidak menguntungkan usaha mentjiptakan „iklim baik” bagi pengerahan funds and forces progresif.
3. Berbagai peraturan warisan djaman „penjelewengan”, djaman sebelum Manipol dibidang perdagangan, import,

export dan interinsulair, mengundang kegandjilan karena antaranja mewadajibkan tiap orang warga-negara Indonesia untuk membuktikan bahwa orang-tuanja djuga dilahirkan di Indonesia.

Peraturan ini mengundang „diskriminasi”, karena U.U. kewanga-negeraan R.I. menentukan, bahwa tidak hanja orang jang dilahirkan sebagai keturunan kedua dari seorang asing, dapat mendjadi warga-negara Indonesia. Pun orang jang dilahirkan dari orang tua asing, menurut ketentuan U.U. tersebut dapat mendjadi warga-negara Indonesia. Ketentuan tersebut tidak mentjiptakan „iklim baik” jang memelihara dan memperkokoh rasa bersatu, rasa senasib dan sepenanggungan, sebagai warga-negara Indonesia tunggal, jang djustru diperlukan untuk mentjapai tingkat paling maximum daripada konsentrasi segala kekuatan nasional revolusioner, seperti ditugaskan oleh Manipol.

4. Masih adanja pedjabat negeri jang „main minta bukti kewarga-negeraan” dan ada djuga sementara orang, jang tjoba mengandjurkan dan mengadakan tekanan psychis, supaja orang<sup>2</sup> keturunan asing mengganti namanja dengan nama jang dikatakan asli. Sistim main minta bukti ini terang merugikan „iklim baik” untuk memupuk rasa „warga-negara Indonesia tunggal” dan adanja andjuran mengganti nama, terang bertentangan dengan nasionalisme Pantja Sila, jang berdjiwa besar, jang menentang rasialisme menentang chauvinisme, serta merugikan Pantja Sila sebagai alat pemersatu, jang mewadajibkan bukan hanja toleransi ideologie politik untuk mentjiptakan Gotong-Rojong dengan poros Nasakom, melainkan djuga toleransi dalam menghadapi perbedaan „physical and cultural traits”, djadi djuga toleransi dalam menghadapi perbedaan suara nama dan agama jang dianut oleh golongan<sup>2</sup> ethnic jang banjak ragamnja dikepulauan kita ini. Lagipula andjuran „ganti nama” tidak tjotjok dengan kenjataan jang membuktikan, bahwa suara nama bukanlah garantie akan rasa tjinta tanah air seseorang. Sedang dalam tingkat revolusi kita sekarang ini, kita djustru

membuktikan rasa bersatu, bergeloranja rasa tjinta tanah air, bukan dipertadjamnja persoalan nama, jang hanja dapat menjelewengkan perhatian daripada tudjuan revolusi kita jang sesungguhnya.

Demikianlah diantara berbagai matjam „bottle-necks” jang sementara ini dapat menghambat dan meratjuni iklim baik pengerahan funds and forces demi untuk kelantjaran pelaksanaan ketetapan MPRS dan suksesnja Komando Operasi Ekonomi jang langsung dipimpin oleh Bung Karno sendiri sebagai Pemimpin Besar Revolusi kita.

Djakarta, 14 Djuni 1962.

---

**Menteri Sudibjo :**

## **NASIONALISME KITA BUKAN SOVINISTIS**

Menteri/Sekdjen PB Front Nasional, Sudibjo, menerangkan dalam wedjangannya didepan Sidang Konperensi Pleno Baperki hari Sabtu siang digedung Universitas Baperki di djalan Tangerang, Grogol, Djakarta, bahwa sesuai dengan ajaran<sup>2</sup> agama Islam jang dianutnja, maka ia berpendapat, bahwa nasionalisme kita seharusnya di-isi dengan toleransi, hingga tidak mendjadi suatu nasionalisme jang sovinitis.

Sikap demikian itu menurut Menteri Sudibjo sesuai dengan ajaran agama Islam jang a.l. berisi ajaran untuk menilai seseorang bukan berdasarkan atas pertimbangan<sup>2</sup> asal keturunannya, tapi atas kenyataan<sup>2</sup> mengenai berguna atau tidaknja seseorang itu dalam pengabdianja kepada masjarakat.

Dikemukakan sebagai tjontoh, bahwa pada waktu Nabi Mohammad bertindak membebaskan kaum budak, maka dibebaskanlah oleh Nabi seorang jang tidak berbangsa Arab, tapi berasal dari keturunan Afrika, jaitu Bilal, jang setelah pembebasannja dari belunggu<sup>2</sup> perbudakan ternjata mendjadi seorang jang setia terhadap Nabi dan dapat diserahi tugas mendjadi Muadzin.

Hal ini dikemukakan oleh Menteri/Sekdjen PB Front Nasional dengan pendjelasan, bahwa sekali lagi ternjata, amal manusialah jang paling utama dalam kita menilai perbuatan seseorang didalam masjarakat, dan bukan asal keturunannya jang harus didjadikan ukuran penilaian.

Nama seseorang, kata Menteri selandjutnja, bukanlah sjarat mutlak bagi pengabdianja terhadap nusa dan bangsa, dan berdasarkan pendapat<sup>2</sup> diatas ini, maka Menteri Sudibjo dengan tegas mengatakan, bahwa oleh karena itu, Menteri tidak dapat menjetudjui andjuran<sup>2</sup> ganti nama seseorang

warga-negara Indonesia jang berasal dari keturunan asing.

Kepada para peserta Konperensi Pleno Baperki, Menteri Sudibjo selandjutnja meminta perhatian, agar tiap<sup>2</sup> politik petjah-belah jang ditjoba diusahakan oleh kaum imperialis melalui berbagai matjam djalan, misalnja melalui usaha<sup>2</sup> untuk menimbulkan kesan se-olah<sup>2</sup> para warga-negara jang masih mempergunakan nama asalnja harus ditjap sebagai orang<sup>2</sup> jang tidak mungkin setia atau berdjasa kepada nusa dan bangsa Indonesia, diperhatikan setjara seksama agar tidak terdjadi penjelewengan djalan pikiran, se-olah<sup>2</sup> nama-lah jang harus didjadikan ukuran nasionalisme seseorang.

Wedjangan Menteri Sudibjo itu sekali lagi menegaskan, bahwa nasionalisme kita bukan sovinitis, tapi harus di-isi dengan toleransi, sesuai dengan garis jang pernah digariskan oleh Presiden Sukarno, jang dengan tegas menjatakan kepada Kongres Baperki di Solo beberapa tahun jl, bahwa nasion Indonesia ini dalam kenjataannya terdiri dari berbagai matjam suku<sup>2</sup> bangsa dan asal keturunan.

Kemudian, setelah selesai mengupas masalah jang menjangkut persoalan nasion Indonesia seperti tsb diatas, Menteri Sudibjo menjatakan betapa perlu-mutlaknja usaha<sup>2</sup> kita dewasa ini dititik-beratkan kepada usaha<sup>2</sup> penjelesaian masalah ekonomi jang demikian sulitnja.

Sesuai dengan garis Pemerintah jang sekarang telah ber-tekad untuk melakukan perbaikan<sup>2</sup> dibidang ekonomi setelah masalah keamanan dan pembebasan Irian Barat selesai, maka oleh Menteri Sudibjo diandjurkan, agar kita semua dewasa ini ber-lomba<sup>2</sup> ikut memberikan andil kepada usaha<sup>2</sup> penjelesaian kesulitan<sup>2</sup> ekonomi.

Dalam hubungan ini didjelaskan oleh Menteri, bahwa Front Nasional jang diketuainja telah menginstruksikan ke-daerah<sup>2</sup>, supaja dibentuk pelopor<sup>2</sup> kerdja di-desa<sup>2</sup>, dan mengingat, bahwa pelopor<sup>2</sup> kerdja itu akan dapat berguna bagi usaha memperbaiki masalah perekonomian, maka Menteri mengandjurkan supaja semua organisasi<sup>2</sup>, termasuk Baperki, aktip memberikan bantuannya untuk mensukseskan pelaksanaan instruksi tsb diatas.

Achirnja, Menteri Sudibjo mensinjalir, bahwa dalam usaha

kita bersama untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, kita menghadapi kenyataan<sup>2</sup> tentang betapa hebatnja perongrongan jang dilakukan oleh sisa<sup>2</sup> imperialisme dan sisa<sup>2</sup> feodalisme dinegeri kita, jang dalam taraf sekarang sedang dan harus melakukan perubahan<sup>2</sup> dalam bidang perekonomian jang agraris menjadi ekonomi industri.

---

D.N. Aidit kepada TC Gerwani :

## RASIALISME MELEMAHKAN PERSATUAN NASIONAL

— Pantja Sila (1945) adalah kelandjutan  
daripada gagasan Nasakom (1926),  
ke-dua<sup>2</sup>nja alat-pemersatu.

Pada tanggal 23 dan 27 Oktober 1962, Ketua CC PKI, D. N. Aidit telah memberikan tjeramah kepada Training Centre Gerwani dengan djudul „Marxisme Dalam Praktek”. Setelah mendjelaskan serba singkat tentang tiga komponen daripada Marxisme, jaitu filsafat, ekonomi politik dan Sosialisme, Aidit mendjelaskan beberapa aspek daripada praktek Marxisme di Indonesia, jang singkatnja a.l. sbb :

Bukanlah suatu kebetulan, bahwa dalam buku Bung Karno **Dibawah Bendera Revolusi** artikel pertamanya ialah tulisan jang berdjudul **Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme**. Ini harus diartikan, bahwa sedjak ditulisnja artikel itu, dalam tahun 1926, jang memuat analisa jang mendalam tentang keadaan sosial dan politik Indonesia, gagasan Nasakom sudah lahir. Sedjak itu perdjjuangan Rakjat Indonesia, disedari atau tidak disedari, berlangsung dan mentjapai kemenangan<sup>2</sup> dibawah kibaran pandji<sup>2</sup> Nasakom. Tanpa memahami ini tak seorang pun ahli sedjarah atau ahli politik akan dapat mengerti apa jang sedang terdjadi di Indonesia sekarang.

Pantja Sila jang ditjetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Djuni 1945 adalah kelandjutan daripada gagasan Nasakom tahun 1926 itu. Tanpa mengerti betul isi dan semangat tulisan **Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme** orang tidak mungkin mengerti apa sebenarnja Pantja Sila. Orang<sup>2</sup> jang

tidak mengerti atau tidak mau mengerti Pantja Sila inilah jang suka menggunakan Pantja Sila untuk menimbulkan perpejahan didalam persatuan nasional. Padahal baik gagasan Nasakom maupun Pantja Sila adalah alat pemersatu seluruh Rakjat revolusioner. Demikian pula UUD 1945 adalah djuga alat pemersatu setelah Rakjat Indonesia mempunjai alat perdjjuangan jang berupa negara, sedangkan Manipol (1959) adalah program bersama jang harus dilaksanakan oleh Rakjat jang bersatu dengan landasan Nasakom, Pantja Sila dan UUD 1945.

Djadi, gagasan Nasakom (1926), Pantja Sila (Djuni 1945), UUD 1945 dan Manipol (1959) adalah satu kesatuan jang tidak ter-pisah<sup>2</sup>kan dalam usaha Rakjat Indonesia menjelesaikan revolusi nasional-demokratisnja dan selandjutnja dalam menudju ke Sosialisme. Inilah interpretasi jang rasionil terhadap dokumen<sup>2</sup> bersedjarah itu.

**Tanpa Menjetudju Nasakom Tidak  
Mungkin Mendjadi Pemimpin Rakjat  
Indonesia.**

Ada orang jang mau mendjadi pemimpin Rakjat Indonesia, atau menamakan dirinja pemimpin Rakjat Indonesia, tapi tidak menjetudju Nasakom. Atau ada djuga jang menjetudju hanja dalam kata<sup>2</sup>, tapi dalam perbuatan tidak, atau mendjalankan „dubbel boekhouding”, jaitu dimuka orang banjak kemak-kemik Nasakom, tapi dalam „lingkungan ketjil” mentang Nasakom. Orang<sup>2</sup> demikian ini tidak mungkin mendjadi pemimpin Rakjat Indonesia jang sungguh<sup>2</sup> dan pengikut<sup>2</sup>nja sendiri akan bingung karena mukaduanja.

Apa sebabnja? Setjara kasar kekuatan politik di Indonesia sekarang terbagi tiga, jaitu: sepertiga Nasonalis, sepertiga Agama dan sepertiga Komunis. Seorang pemimpin jang tidak menjetudju Nasakom, ia hanja pemimpin sepertiga daripada Rakjat Indonesia, atau paling banter duapertiga, dan pemimpin demikian itu tidak bisa dinamakan pemimpin Rakjat Indonesia. Ia pemimpin „ompong”. Djuga pemerintah jang tidak Nasakom adalah pemerintah „om-

pong". Saja minta kepada kader<sup>2</sup> revolusioner baik pria maupun wanita, djuga kepada kader<sup>2</sup> Gerwani, supaja djangan mau mendjadi pemimpin „ompong” ; djadilah pemimpin jang lengkap giginja, jang Nasakom sesuai dengan Konsepsi Presiden Soekarno.

Kalau saja berkata bahwa imbangan kekuatan politik sekarang setjara kasar kira<sup>2</sup>  $3 \times$  sepertiga, ini bukanlah status-quo. Tiap<sup>2</sup> aliran politik jang pro-Manipol berhak memperbesar kekuatannya asal sadja tidak dengan djalan djegal<sup>2</sup>an atau srimpung<sup>2</sup>an, karena ini tidak sesuai dengan alam Demokrasi Terpimpin. Djalan memperkuat diri bagi tiap<sup>2</sup> aliran politik jang pro-Manipol, jalah ber-lomba<sup>2</sup> mengabdikan kepentingan Rakjat, memperhebat amal kepada Rakjat, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat. Inilah djalan damai untuk menjelesaikan revolusi nasional-demokratis kita guna selandjutnja menudju ke Sosialisme.

Kita sekarang sudah mempunjai organisasi Front Nasional jang baik dan hebat. Tiap<sup>2</sup> orang revolusioner Indonesia harus berbangga hati mempunjai organisasi FN seperti jang kita miliki sekarang. Tetapi, djangan sekedjap mata dilupakan FN hanja bisa kuat djika kekuatan pokok revolusi, jaitu kaum buruh dan kaum tani mendjadi kekuatan pokok pula daripada FN. Dan ini hanja mungkin djika FN sungguh<sup>2</sup> mengabdikan kepentingan kaum buruh dan kaum tani.

Oleh karena itulah saja mengharapkan agar Gerwani lebih giat lagi bekerdja dikalangan kaum buruh dan kaum tani, chususnja dikalangan wanitanja.

### **Rasialisme Harus Terus Diperangi, Karena Melemahkan Persatuan Nasional.**

Kaum reaksioner tidak suka persatuan nasional kita mendjadi kuat, oleh karena itu mereka tidak henti<sup>2</sup>nja menimbulkan perpetjahan dalam persatuan nasional kita. Disamping me-njebat<sup>2</sup>kan Komunisto-phobia, Rakjat-phobia, dsb mereka berusaha untuk me-ngobar<sup>2</sup>kan rasialisme. Dalam rangka mendjilat imperialis Amerika Serikat, chususnja dalam rangka untuk mendapat kredit dari negara besar itu, sebagaimana djuga tuan Nehru dari India, kaum reaksioner

dinegeri kita terus-menerus mentjari kesempatan untuk mengobar<sup>2</sup>kan semangat anti-Tionghoa dan mempertentangkan warga-negara „asli” dan „tidak asli”.

Tetapi untuuglah perdjjuangan bangsa Indonesia mempunjai tradisi jang baik dalam menentang rasialisme, dan pembinaan nasion Indonesia berdjjalan ber-sama<sup>2</sup> dengan perdjjuangan melawan rasialisme. Sedjak Indisch Partij tahun 1912 kita sudah berdjjuang melawan rasialisme, dan Bung Karno sendiri adalah tokoh terkemuka dalam perdjjuangan melawan rasialisme.

Bung Karno pernah dikritik oleh orang<sup>2</sup> soviniis ketika beliau memasukkan dua orang Tionghoa, jaitu Saudara Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe kedalam redaksi madjalah **Suluh Indonesia Muda**. Beliau namakan kritik demikian sebagai pendirian orang jang „sempit budi”, sebagai „katak dibawah tempurung”. Tidak seperti kaum rasialis kita sekarang, Bung Karno pada waktu itu tidak mengandjurkan kepada Sdr. Kwee Kek Beng dan Dr. Kwa Tjoan Sioe untuk mengganti nama mereka dengan nama „asli” misalnja dengan Badjigur atau Rudjak Sentul.

Rasialisme jang mempersoalkan penggantian nama adalah rasialisme jang paling koprot, paling tidak masuk akal, paling tidak ilmiah, dan dinegeri kita telah menimbulkan banyak lelutjon dan kesedihan. Waktu Lany Gumuljo memenangkan banjak medali dari kolam renang Asian Games jbl, Gumuljo S.H. direktur Bank Timur banjak dapat salam dari kiri dan kanan karena banjak orang mengira Lany Gumuljo adalah keponakan Gumuljo S.H., dan seorang pun tidak bertanja „siapa sih nama Tionghoanja?”. Tapi olahragawan keturunan Tionghoa jang sudah ganti-nama tapi menderita kekalahan ditanjakan orang „siapa sih nama Tionghoanja?”

Ada lagi tjontoh jang menjedihkan. Seorang kapitalis demi mendapat fasilitas<sup>2</sup> dia ganti-nama. Mula<sup>2</sup> nama „asli” itu dia dapat fasilitas<sup>2</sup>, tetapi setelah ketahuan bahwa dia tidak „asli” fasilitasnja ditjabut, dan sebagai balasan dia meninggalkan kewarga-negaraan Indonesia dengan membawa nama „asli”, sehingga ia mendjadi warga-negara asing dengan nama „asli” Indonesia.

Oleh karena itu kita harus terus memerangi rasialisme yang koprot ini. Bagi kita pasti masih lebih baik Drs. Kho Bian Tie, anggota Staf Komando Operasi Ekonomi, yang namanya tidak „asli“, daripada Kartosuwirjo bekas kepala gerombolan DI-TII, yang namanya „asli“ atau dikira „asli“.

Sesuai dengan tradisi anti-rasialisme kita yang sudah setengah abad lamanya, marilah kita teruskan perjuangan melawan rasialisme, baik yang berbentuk purbasangka warna kulit, purbasangka keturunan maupun yang bentuknya paling rendah dan paling koprot, yaitu ganti-nama, apalagi setjara paksa. Perjuangan melawan rasialisme adalah perjuangan untuk meniadakan kontradiksi yang tidak perlu dikalangan Rakjat, dan ini berarti memperkuat persatuan nasional.

Sebagai penutup saja mengharap kepada kader<sup>2</sup> Gerwani supaya terus berdiri dibarisan depan dalam perjuangan untuk emansipasi wanita, tetapi sekedjappun djangan lupa bahwa emansipasi yang sungguh<sup>2</sup> hanja terdapat dalam masyarakat Sosialis, dimana terdapat emansipasi antara sesama manusia. Oleh karena itu Gerwani harus mendjadi bagian yang tak-terpisahkan daripada perjuangan umum Rakjat Indonesia untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi, untuk emansipasi antar-manusia dan antar-bangsa, dan untuk Sosialisme.

---

## SOAL NAMA „ASLI” DAN „TIDAK ASLI”

Kutipan dari induk karangan s.k.  
„MERDEKA” tgl 12 Nopember 1962.

METERI Sekdjen Front Nasional Sudibjo dalam pidato-  
nja Sabtu siang jbl, menjatakan bahwa „nama seseorang  
bukanlah sjarat mutlak bagi pengabdianja terhadap nusa  
dan bangsa, dan berdasarkan pendapat ini maka Menteri  
Sudibjo dengan tegas menjatakan tidak dapat menjetudju  
andjuran<sup>2</sup> ganti nama seseorang warga-negara Indonesia  
jang berasal dari keturunan asing. Menteri mengatakan  
bahwa sesuai dengan adjaran<sup>2</sup> agama Islam, maka nasional-  
isme kita seharusnya di-isi dengan toleransi, hingga tidak  
mendjadi suatu nasionalisme jang sovunistis. Dikemukakan  
satu tjontoh dari sedjarah Islam, betapa seorang jang bukan  
berbangsa Arab akan tetap<sup>2</sup> berasal dari Afrika, yakni Bilal,  
dapt mendjadi seorang jang setia kepada Nabi Muhammad  
s.a.w. dan bahkan oleh Nabi diserahkan tugas sebagai  
Muadzin.

Kita sepenuhnya sependapat dengan pendirian Menteri  
Sekdjen Front Nasional tsb. Dan kita harapkan hendaknja  
dalam persoalan nama seseorang ini ada ketegasan dan ke-  
djelasan. Djangan hendaknja sampai bisa timbul fitnah atau  
pendapat<sup>2</sup> tidak sehat jang berasal dari paham nasionalisme  
jang sovunistis, bahwa orang<sup>2</sup> atau warganegara<sup>2</sup> Indonesia  
keturunan asing jang tidak mengganti namanja dengan se-  
buah nama Indonesia dianggap a-nasional atau anti-nasional.  
Begitupun hendaknja djangan sampai timbul fitnah jang se-  
wenang<sup>2</sup> kepada orang<sup>2</sup> jang berpendapat bahwa nama se-  
seseorang tidak usah di-ganti<sup>2</sup>, bahwa orang<sup>2</sup> ini anti-nasional,  
kontra revolusioner atau tuduhan<sup>2</sup> sematjamnja ! Kita malah

berpendapat bahwa orang<sup>2</sup> jang „mengandjurkan” setjara paksa ataupun „mengandjurkan setjara halus” warganegara<sup>2</sup> Indonesia jang tidak mempunjai „nama asli” untuk menggantikan namanja dengan sebuah nama „asli”, merekalah jang sebenarnya a-nasional atau tidak mengerti Pantjasila, ke-bhineka-tunggal-ika-an Indonesia, Manipol-Djarek dan Resopim.

Kita masih terlalu banjak mendengar kedjadian<sup>2</sup> jang tidak pada tempatnja disekitar persoalan „nama asli” dan „tidak asli” ini. Sampai<sup>2</sup> dikalangan kewartawanan atau tegasnja PWI dialami kedjadian<sup>2</sup> jang tidak pada tempatnja. Seorang pedjabat Deppen malah pernah meretour kembali permintaan PWI untuk mendapatkan kartu-pers bagi seorang anggotanja dengan alasan „perlu dibuktikan dulu kewarga-negaraannja”. Kita sesalkan bahwa hal<sup>2</sup> seperti itu masih bisa terjadi, padahal PWI adalah satu organisasi wartawan nasional jang dengan sendirinja bertanggung-djawab dan mendjamin bahwa seluruh anggotanja adalah warganegara<sup>2</sup> Indonesia, bukan asing! Kesimpang-siuran dalam soal w.n. „asli” dan „tidak asli” ini menjebabkan peristiwa<sup>2</sup> seperti itu terus-menerus timbul. Dalam mentjari pemetjahannja tidak bisa lain kita harus kembali kepada perinsip<sup>2</sup> Pantja Sila dan ke-bhineka-tunggal-ika-an Indonesia. Ini berarti bahwa tidak ada seorang w.n. Indonesiapun jang boleh dipaksa atau „diandjurkan” untuk mengganti namanja!

---

Tjataan : Sebagai response, induk karangan „Merdeka” ini dimuat kembali selengkapnja dalam ruangan „Komentar” s.k. harian „Bintang Timur” tgl 13 Nopember 1962.